

**PERUBAHAN KELAMIN BAGI TRANSSEKSUAL DALAM
KAITANNYA DENGAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM
ISLAM**

TESIS

Program Studi

Magister Kenotariatan UNDIP



Oleh :

MEUTIA DAMAIYANTI, SH

B4B.003.121

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2005**

**PERUBAHAN KELAMIN BAGI TRANSSEKSUAL DALAM
KAITANNYA DENGAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM
ISLAM**

TESIS

Oleh :

MEUTIA DAMAIYANTI,SH
B4B.003.121


Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 18 Agustus 2005
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat untuk Diterima

Mengetahui
Komisi pembimbing

Pembimbing Utama


Prof. H. Abdullah Kelib, SH
NIP. 130 354 857

Ketua Program Studi


Mulyadi, SH.,MS.
NIP. 130 529 429

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri di dalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan lembaga pendidikan lainnya.

Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Agustus 2005

Meutia Damaiyanti, SH

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan penulis untuk meraih gelar kesarjanaan Magister Kenotariatan, tidak lupa penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT. Sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan tesis ini hanya semata-mata karena ridho-Nya.

Penulisan ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan derajat S2 pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang. Selama proses penulisan tesis yang berjudul : **PERUBAHAN KELAMIN BAGI TRANSSEKSUAL DALAM KAITANNYA DENGAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM**, sejak penyusunan rancangan penelitian, studi kepustakaan, pengumpulan data serta pengolahan hasil penelitian dan pembahasan sampai akhir terselesainya penulisan tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan baik sumbangan pemikiran maupun tenaga yang kiranya sulit bagi penulis untuk menilainya. Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh keikhlasan menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Eko Budiharjo, MSc selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. dr. Suharyo Hadisaputra, Sp, PD (K) selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

3. Bapak Mulyadi, SH, MS., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro sekaligus selaku dosen penguji tesis.
4. Bapak Yunanto, SH, MHum selaku Sekretaris Progran Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro sekaligus previewr proposal dan dosen penguji tesis.
5. Bapak Prof. H. Abdullah Kelib, SH selaku dosen pembimbing utama tesis penulis sekaligus dosen penguji.
6. Ibu Rofah Setyowati, SH, MHum selaku previewer proposal sekaligus dosen penguji tesis penulis.
7. Bapak Zubaidi, SH, MHum selaku previewer proposal sekaligus dosen penguji penulis.
8. Para Guru Besar, Staf Pengajar dan Staf Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.
9. Rekan-rekan Mahasiswa Program Studi Kenotariatan Angkatan 2001, 2002, 2003, 2004 yang selalu mendorong penulis untuk menyelesaikan tesis ini baik secara langsung maupun tidal langsung sehingga akhirnya dapat menyelesaikan tesis ini.
10. Seseorang yang kucintai dan kusayangi Akhmad Norman, SH, MKn yang selama studi di Semarang telah ikut memberikan dorongan, pemikiran dan semangat baik suka maupun duka kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian ini sejak awal sampai akhir penulisan tesis ini.

Pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dari lubuk hati yang tulus dan ikhlas kepada Ayahanda Drs. H. Syarnubi HM Sayid dan Mama Dra. Hj. Rosita Heryati yang tercinta karena dengan ketabahannnya dan pengorbanan telah membesarkan, serta mendidik penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dengan sempurna. Tak lupa kuucapkan terima kasih juga kepada adikku Prayoga Aditia, ST yang kusayangi.

Tiada lain yang dapat penulis perbuat hanyalah berdoa, mudah-mudahan Tuhan akan memberikan balasan atas segala budi baik dan melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua. Amin...

Akhirnya penulis sangat menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan, waktu, dan terbatasnya literatur. Namun dengan tekad dan rasa ingin tahu dalam pengembangan ilmu, maka penulis dapat menyelesaikannya, untuk itu penulis sangat mengharapkan dan berterima kasih apabila ada kritikan dan saran yang bersifat membangun demi menuju kesempurnaan tesis ini.

Wassalam...

Semarang, Agustus 2005

Meutia Damaiyanti, SH

“Kadang beda antara sukses dan gagal

Tak lebih dari mencoba sekali lagi “

MEUTIA DAMAIYANTI, SH, MKn

ABSTRAK

PERUBAHAN KELAMIN BAGI TRANSSEKSUAL DALAM KAITANNYA DENGAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM

Fenomena transseksual merupakan fenomena yang benar-benar ada di antara kita sebagai akibat dari perkembangan sosial dewasa ini. Transseksual dalam pembicaraan medis-psikologis dikenal sebagai gangguan yang sangat berat, kondisi dan konflik terhadap kejiwaan khususnya terhadap keabnormalitasan seksual.

Di dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dibidang kedokteran, memungkinkan penderita transseksual untuk melakukan operasi ubah jenis kelamin menjadi kelamin lawan jenisnya. Berkenaan dengan hal itu, tentunya operasi ubah jenis kelamin tersebut tidak akan terlepas dari permasalahan. Adapun permasalahan yang akan diuraikan adalah perubahan kelamin bagi transseksual menurut hukum Islam serta akibat hukum perubahan kelamin bagi transseksual terhadap perkawinan menurut hukum Islam.

Untuk menjawab permasalahan diatas, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif yakni dengan menggunakan data-data sekunder, dengan jalan menginventarisasikan pendapat-pendapat ahli, artikel-artikel, tulisan-tulisan ilmiah dan referensi lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti serta studi lapangan melalui wawancara sebagai pelengkap. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa ada tiga macam bentuk operasi kelamin dalam dunia kedokteran yaitu; operasi perbaikan kelamin atau penyempurnaan kelamin, operasi penyesuaian kelamin atau operasi memperjelas salah satu jenis organ kelamin, operasi penggantian jenis kelamin. Dalam pandangan hukum Islam, operasi ubah jenis kelamin bagi transseksual haram hukumnya. Adanya kecendrungan untuk mengubah ciptaan Allah sebagai keinginan duniawi dan pribadi yang disertai nafsu belaka tanpa melihat kerusakan akan lebih besar daripada manfaatnya. Berkenaan dengan status atau jenis kelamin di dalam kedudukan hukum bagi transseksual pasca operasi harus diajukan permohonan perubahan jenis kelamin melalui penetapan pengadilan. Sedangkan perkawinan yang dilakukan penderita transseksual pasca operasi menurut hukum Islam tidak diperbolehkan. Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan oleh sesama jenis kelamin dan Islam menolak tegas perkawinan semacam itu.

(Kata Kunci : Transseksual)

ABSTRACT

SEX CHANGING FOR TRANSEXUAL RELATED TO MARRIAGE ACCORDING TO ISLAMIC LAW

Transsexual phenomenon is a real one in our surrounding as the effect of social development recently. Transsexual in the matter of medical-psychology is known as an acute disorder, mental condition and conflict particularly on sexual abnormality.

In science and technology development, particularly in medical field enable transsexual sufferers to change their sex. Concerning the matter, the sex changing operation is not free of the problems. The problem described here is sex changing for transsexual on marriage according to Islamic law.

To answer the aforementioned problem, the writer applied juridical normative approach, that is, by using secondary data, inventorying expert's opinions, articles, scientific writings and the other relevant reference concerning the matter examined and field study through interviews as complementary. The data obtained was analyzed by qualitative descriptive method.

From the research result conducted, it was concluded that there are three kinds of sex operation in medical field; sex upgrading operation, sex adjustment operation to clarify one of sex organs, and sex changing operation. In the point of view of Islamic law, operation to change sex for transsexual is prohibited (haram). The tendency to change Allah's creation, as worldly and personal desire along with passion only, causes damage rather than the benefit. Concerning the status and sex in law for transsexual in post operation, the sex changing should be proposed through a trial. Whereas, a marriage conducted by transsexual sufferer after the operation is prohibited according to Islamic law. Basically, that marriage is conducted by the same sex and Islam strictly rejects that kind of marriage.

(Keyword: Transsexual)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Kontribusi Penelitian	6
1.5. Sistematika Penelitian	6
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kelamin	8
2.2. Tinjauan Medis Tentang Kalamini	11
2.3. Tinjauan Umum Tentang Transseksual	
2.3.1. Definisi Transseksual	12
2.3.2. Gejala Transseksual	16
2.3.3. Perkembangan Transseksual	18
2.3.4. Faktor Penyebab Transseksual	20
2.3.5. Tipe-tipe Transseksual	22
2.3.6. Penanganan Transseksual	22
2.4. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Islam	
2.4.1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan	25
2.4.2. Rukun dan Syarat Perkawinan	30
2.4.3. Perwalian Dalam Perkawinan	33
2.4.4. Akibat Hukum Dalam Perkawinan	35
2.4.5. Pembatalan Perkawinan	41
2.4.6. Putusnya perkawinan	42
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Metode Pendekatan	49
3.2. Spesifikasi Penelitian	50

3.3. Metode Pengumpulan Data	50
3.4. Analisa Data	51
3.5. Metode Penyajian Data	52
3.6 Populasi dan Sampel	52
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Perubahan Kelamin Bagi Transseksual Menurut Hukum Islam	
4.1.1. Operasi Kelamin Dalam Dunia Kedokteran	54
4.1.2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasi Kelamin	57
4.2. Akibat Hukum Perubahan Kelamin Bagi Transseksual Terhadap Perkawinan Menurut Hukum Islam	
4.2.1. Kedudukan Hukum Bagi Transseksual Pasca Operasi	73
4.2.2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Bagi Transseksual Pasca Operasi	75
BAB V	PENUTUP
5.1. Kesimpulan	81
5.2. Saran-saran	85

PERUBAHAN KELAMIN BAGI TRANSSEKSUAL DALAM KAITANNYA DENGAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan sosial yang dewasa ini banyak terjadi dan benar-benar ada diantara kita adalah fenomena transseksual. Fenomena ini dalam pembicaraan medis-psikologis dikenal sebagai gangguan yang sangat berat, kondisi dan konflik yang dialami seringkali melibatkan sebuah pilihan hidup mati bagi yang mengalaminya. Berbicara tentang transseksual adalah berbicara tentang abnormalitas seksual dengan permasalahannya yang kompleks. Ia tidak saja berdiri didepan kaca biologi, psikologi, medis, sosiologi, politik dan ekonomi, tetapi juga diambang keagamaan.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dibidang kedokteran, memungkinkan penderita transseksual untuk melakukan operasi bedah plastik, sebagai salah satu jalan untuk mengatasi gangguan kejiwaannya, dengan merubah jenis kelamin sesuai dengan yang dikehendaknya menjadi jenis kelamin lawan jenisnya. Operasi ini dikenal dengan operasi ubah jenis kelamin atau dalam istilah kedokteran disebut *operasi transsexual* dengan cara melakukan operasi *rekonstruksi genital*.

Menurut Dokter Ismet Yusuf dari bagian psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang menyatakan pada dasarnya dalam

ilmu kedokteran ada 10 aspek yang menentukan apakah seseorang dikategorikan sebagai pria atau wanita, yakni enam (6) aspek biologis dan empat (4) aspek psikologis. Keenam aspek biologis itu adalah susunan kromosom (xx atau xy), alat kelamin (vulva dan vagina atau penis), jenis gonade (indung telur/testis), alat kelamin dalam (tuba dan uterus/epididimus dan saluran sperma), hormon seks (estrogen dan progesteron/testosteron) serta tanda kelamin sekunder (pertumbuhan bulu, tulang payudara, dan lainnya). Sedangkan empat aspek psikologis dimaksud meliputi identitas seksual yang merupakan konsep diri, perilaku gender, orientasi seksualitas dan perilaku seksual.¹

Identitas seseorang itu menjadi laki-laki atau perempuan tidak ditentukan oleh omongan dirinya tetapi ditentukan oleh bentuk fisik dan fungsi-fungsi faat tubuhnya secara biologis atau medis. Dalam pandangan Hukum Islam identitas seseorang menjadi laki-laki atau perempuan harus dikembalikan secara fisik dan fungsi biologis itu tadi. Pada prinsipnya menurut hukum Islam penentuan jenis hukum terhadap operasi ubah kelamin sebagai suatu tindakan medis dalam perkara ini sangat tergantung pada illat (alasan) nya. Hal tersebut didasarkan pada perkembangan maslahat dan madarat. Dalam hal ini berkaitan dengan 10 aspek penentuan jenis kelamin. Sehingga dapat dipahami bahwa operasi ubah jenis kelamin atau untuk menentukan dilaksanakan operasi jenis kelamin tersebut harus didasarkan pertimbangan yang matang, karena akan banyak berpengaruh terhadap perbuatan hukum seseorang pasca operasi tersebut.

¹. *Suara Merdeka*, 29 Januari 2004, Hal.1

Sebagaimana diketahui bahwa kedudukan hukum seseorang antara lain ditentukan oleh status atau jenis kelamin. Berkenaan dengan hal itu peraturan perundang-undangan hanya mengenal istilah laki-laki dan perempuan. Pada dasarnya semua orang diakui mempunyai kewenangan hukum dan semua orang adalah sama dihadapan hukum, namun dalam pelaksanaannya lebih lanjut hukum dapat memberikan perkecualian-perkecualian tertentu seperti atas dasar perbedaan sifat pembawaan dua orang dari dua jenis kelamin yang berlainan, bisa mempunyai pengaruh didalam hukum yang membawa akibat bahwa hukum terpaksa membuat penyimpangan dari prinsip tersebut diatas.² Oleh karena itu jelas terdapat perbedaan hak dan kewajiban antara pria dan wanita, salah satunya dibidang perkawinan.

Sudah menjadi kodrat Tuhan bahwa dalam kehidupan manusia di dunia ini, yang berlainan jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan secara alamiah mempunyai daya tarik menarik antara satu dengan yang lainnya untuk saling mengenal, mengamati dan mencintai. Bahkan mereka juga mempunyai keinginan untuk dapat hidup bersama atau secara logis dapat dikatakan membentuk suatu ikatan lahir dan batin di dalam suatu perkawinan dengan tujuan menciptakan suatu keluarga atau rumah tangga yang rukun, bahagia, sejahtera dan abadi.

².Asadori et al, *Tinjauan Yuridis Perubahan Jenis Kelamin Pria menjadi Wanita*, Universitas DiPoegoro, Semarang, 2004, hal 2

Hal tersebut bukanlah merupakan suatu kehausan orang berpendapat atau menitik beratkan pada persetubuhan belaka, meskipun hubungan seksual itu merupakan faktor yang penting sebagai penunjang atau pendorong sekaligus dalam rangka merealisasikan keinginan hidup bersama, baik untuk mendapat keturunan atau anak maupun sekedar memenuhi kebutuhan biologis atau keinginan hawa nafsu belaka.³

Menurut pandangan agama Islam, perkawinan adalah perintah Allah SWT sekaligus sunnah Nabi Muhammad SAW. Selain itu perkawinan juga merupakan kehendak manusia dan kebutuhan rohani dan jasmani. Menurut H. Arso Sastroadmodjo, SH perkawinan disyariatkan sejak dahulu supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia didunia dan akhirat, dibawah naungan cinta kasih dan ridho Illahi.⁴

Dari beberapa penjelasan diatas, bahwa perkawinan merupakan suatu kebutuhan rohani dan jasmani juga sebagai syariat supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah. Jika hal tersebut dikaitkan dengan operasi ubah jenis kelamin bagi transseksual, mengingat transseksual mempunyai indikasi untuk menikah, maka beberapa hal yang menjadi sebagai tujuan perkawinan yang disyariatkan atau dituntuni tidak terpenuhi salah satunya dalam melangsungkan keturunan. Hal ini dapat dimengerti karena operasi ubah jenis

³. Djoko Prakoso, SH., I Ketut Murtika, SH., *Azas-asaz Hukum Perkawinan Di Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hal.1

⁴. Arso Sastroadmodjo, SH. R, *Hukum Perkawinan*, Bulan Bintang, 1978, Hal.3

1.4. Kontribusi Penelitian

Beranjak dari tujuan penelitian sebagaimana tersebut diatas, maka diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat atau kontribusi sebagai berikut :

1. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran baik berupa pembendaharaan konsep, metode preposisi, maupun pengembangan teori-teori dalam bidang ilmu hukum khususnya mengenai hukum Islam.
2. Dari segi pragmatis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi khususnya terhadap kajian Hukum Islam mengenai perubahan kelamin bagi transseksual dan merupakan bahan masukan bagi pihak-pihak tertentu dalam memutuskan suatu kebijakan.

1.5. Sistematika Penulisan

Agar dapat dimengerti dan dipahami dalam kesimpulan, maka tesis ini dibagi menjadi lima bab :

BAB - I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang pandangan hukum Islam terhadap kelamin, tinjauan medis terhadap kelamin, definisi transseksual, gejala transseksual, perkembangan transseksual, faktor penyebab transseksual, tipe transseksual, penanganan transseksual, pengertian dan tujuan perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, perwalian perkawinan, akibat hukum dalam perkawinan, putusnya perkawinan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode penelitian yang meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, analisa data, metode penyajian data, populasi dan sampel.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang perubahan kelamin bagi transseksual menurut hukum Islam dan akibat hukum perubahan kelamin bagi transseksual terhadap perkawinan menurut hukum Islam.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kelamin

Pada dasarnya Allah SWT menciptakan manusia terdiri dari 2 macam jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Sebagaimana telah dituturkan dalam Al-Qur'an surat Al-Hujarat ayat 13 sebagai berikut :

“ Hai manusia, sesungguhnya Kami (Allah) telah menciptakan kamu dari seorang pria dan perempuan ”⁵

Jika berbicara kelamin berarti hal ini berkaitan dengan gender beserta alat produksinya. Perspektif gender dalam Al-Qur'an tidak sekedar mengatur keserasian relasi gender, hubungan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat tetapi lebih dari itu Al-Qur'an juga mengatur keserasian pola relasi antara mikro-kosmos (manusia), makrokosmos (alam), dan Tuhan.

Secara umum tampaknya Al-Qur'an mengakui adanya perbedaan (distinction) antara laki-laki dan perempuan tetapi perbedaan tersebut bukanlah pembedaan (discrimination) yang menguntungkan satu pihak dan yang merugikan yang lainnya. Perbedaan tersebut dimaksudkan untuk mendukung obsesi Al-Qur'an, yaitu terciptanya hubungan harmonis yang didasari rasa kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) di lingkungan keluarga (Q, S.Al-Rum/30 : 21),

⁵. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV. Penerbit Diponegoro, Bandung, 2003, hal 412

sebagai cikal bakal terwujudnya komunitas ideal dalam suatu negeri yang damai penuh ampunan (Baidat-un tyayibat-un wa rabb-un ghafur/ Q.,S. Saba/34 : 15)

Selain itu Islam juga memberikan hak-hak reproduksinya yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Keseimbangan hak-hak reproduksi laki-laki dan perempuan dapat dilihat dalam beberapa konsep hukum kekeluargaan (Al-ahwal al-syakhshiyah) sebagai berikut :⁶

1. Memilih Jodoh

Memilih jodoh atau calon pasangan bukan lagi hak istimewa laki-laki, terutama yang dikenal sebagai hak ijbari ayah, tetapi anak perempuan juga berhak memberikan pandangan dan pendapat yang berbeda dengan pilihan ayahnya.

2. Menentukan perkawinan

Menentukan perkawinan tidak hanya menjadi kewenangan laki-laki, termasuk wali mujbir, tetapi perempuan juga berhak menentukan perkawinannya sendiri, kapan dan dengan siapa akan menikah. Sebab hal ini sangat terkait dengan kesiapan lahir batin, dan yang lebih mengetahui hal itu adalah dirinya sendiri.

3. Menikmati hubungan seksual

Kenikmatan seksual tidak hanya untuk kaum laki-laki dengan anggapan bahwa perempuan / istri hanya untuk melayani keinginan seksual laki-

⁶. Dr. H. Nasarudin Umar, M.A et al., *Bias Jender Dalam Pemahaman Islam*, Gama Media, Yogyakarta, 2002, hal.25

laki/suami. Seks bagi seorang perempuan tidak sekedar sebuah kewajiban, tetap juga adalah hak untuk memperoleh kenikmatan atau menolak manakala ia tidak siap untuk hubungan tersebut sehingga ia tidak harus melakukan hubungan seks secara terpaksa. Karena itu Al-Qur'an menganjurkan untuk melakukan hubungan seks dengan cara yang ma'ruf.

4. Menikmati standar kesehatan seksual dan reproduksi

Sebagai pengemban fungsi dan peran reproduksi, sepantasnya perempuan mendapatkan jaminan kesehatan seksual dan reproduksi mengingat risiko yang harus diterimanya, bahkan bisa menyebabkan terjadinya kematian. Kesehatan reproduksi yang dimaksudkan mencakup kesehatan fisik, mental dan sosial, atau dengan kata lain mencakup keseluruhan fase kehidupan wanita. Al-Qur'an secara tegas melarang seorang laki-laki menggauli istrinya yang sedang dalam kondisi menstruasi.

5. Memilih keturunan

Anak adalah tanggung jawab bersama suami dan istri. Maka menentukan apakah suatu pasangan akan mempunyai anak atau tidak (dengan melakukan rekayasa reproduksi) tidak bisa hanya diputuskan oleh satu pihak (biasanya kaum laki-laki), tetapi perempuan pun berhak meminta atau menolak memiliki keturunan. Apalagi untuk mendapatkan keturunan melibatkan partisipasi kedua belah pihak.

2.2. Tinjauan Medis Terhadap Kelamin

Berbicara tentang kelamin dari tinjauan medisnya berarti berbicara tentang seks atau jenis kelamin dan gender.⁷ Seks atau jenis kelamin merujuk kepada seks anatomis seseorang atau dengan kata lain tipe genital apa yang dimiliki. Seks atau jenis kelamin mewakili penampakan internal genitalia, dan terdapat gonad (Ovarium atau testes) yang menentukan fungsi reproduktif sekaligus hormonal yang membentuknya.

Gender lebih sulit dan lebih kompleks untuk dipersepsikan atau digambarkan. Gender yakni pengenalan atau kesadaran pada diri seseorang, yang juga diharapkan beda orang lain, seperti yang sesuai dengan kategori sosial: anak laki-laki/pria atau anak perempuan/wanita. Mayoritas populasi memiliki gender yang sesuai dengan seks atau jenis kelamin anatomis, sehingga jarang orang yang memahami bahwa seks atau jenis kelamin dan gender adalah dua hal yang berbeda dan terpisah.

Gender terpisah dari dua aspek :

- *Identitas gender (gender identity)*, yakni persepsi internal dan pengalaman seseorang tentang gender mereka, menggambarkan identifikasi psikologis di dalam otak seseorang sebagai laki-laki atau perempuan.

⁷.Yash, *Transseksualisme (Sebuah Studi Kasus perkembangan Transseksual Perempuan Ke Laki-laki)*, Penerbit AINI, Semarang, 2003, hal 18-19

- **Peran gender, (gender role)**, dimana merupakan sebuah cara seseorang hidup dalam masyarakat dan berinteraksi dengan orang lain berdasarkan identitas gender mereka.

Identitas gender akan menggambarkan kondisi psikologi seseorang dalam perilaku seksual. Perilaku seksual secara psikologi ditentukan oleh selera, fantasi, obsesi, pengalaman masa kecil, kejadian-kejadian traumatik, atau faktor-faktor psikologis lainnya. Kondisi psikologi mempunyai keterkaitan yang erat dengan perkembangan hormonal.⁸ Oleh karena itu walaupun seks atau jenis kelamin dan gender adalah dua hal yang terpisah dan berbeda di dalam medis, namun identitas gender seseorang akan dipengaruhi oleh jenis kelamin yang dikenakan kepadanya berdasarkan genital fisiknya.⁹

2.3. Tinjauan Umum Tentang Transseksual

2.3.1. Definisi Transseksual

Transseksual merupakan bagian dari gangguan identitas jenis kelamin. Seorang transeksualis, secara jenis kelamin (jasmani) sempurna dan jelas, tetapi secara psikis menampilkan diri sebagai lawan jenis, dimana sering dianggap sebagai orang yang terjebak pada jenis kelamin yang salah karena identitas kelaminnya yang terganggu.¹⁰ Menurut

⁸. Koeswinarno, *Waria Dan Komunikasi*, The Toyota Foudation, Jakarta, 1993, hal 33

⁹. *Op cit.*, hal 18

¹⁰. Kemala Atmojo, *Kami Bukan Lelaki*, Cet II, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1986, hal

Diagnostic and Statistical Manual of Mental (DSM Disorders -III R)

menuliskan ada empat diagnosis gangguan identitas jenis kelamin, yaitu :

1. Gangguan identitas jenis kelamin pada masa anak-anak
2. Transseksualisme
3. Gangguan identitas jenis kelamin pada masa remaja atau dewasa, tipe nontransseksual
4. Gangguan identitas jenis kelamin yang tidak ditentukan (not otherwise specified)

Pada gangguan transseksual, identitas kelamin (genotip) bertentangan dengan wujud tubuh (fenotip). Orang dengan gangguan Transseksual merasa hidup sebagai orang yang jenis kelamin (psikis) nya berbeda dengan organ kelamin (biologis) nya atau genotipnya berbeda dengan fenotipnya. Kebanyakan dari mereka, perubahan dan koreksi tubuh merupakan “pilihan” untuk keluar dari konflik dalam dirinya, dan meneruskan hidup dikemudian hari yang sesuai dengan identitas kelamin yang dipilihnya.

Transseksual pada umumnya sering juga disalah artikan atau dianggap sebagai individu dengan kondisi interseks secara fisik. Namun sejauh kesepakatan yang telah ada, jelas bahwa transseksual bukanlah individu dengan interseks secara fisik. Kesalahan anggapan oleh

masyarakat ini mungkin timbul sebagai akibat minimnya pengetahuan yang dimiliki mengenai kondisi tersebut.

Identitas sebagai pria atau perempuan dewasa tidak saja ditentukan oleh susunan dan pola kromosom, jenis gonad, kelamin primer dan sekunder, tetapi juga ditentukan oleh faktor psikosial dan religi.

Pada transseksual, terjadinya diferensiasi identitas kelamin berlangsung melalui keempat fase pertama, yaitu *fase diferensiasi kromosom, diferensiasi gonad, alat kelamin dalam, dan alat kelamin luar*, berlangsung seperti biasa pada janin, pada masa intrauterine. Seiring hal itu sudah dirasakan pada saat usia anak sekolah tetapi menjadi genting pada saat pubertas dan jarang diatasi lagi oleh yang bersangkutan setelah akil baliq.¹¹

Menurut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-III R), seseorang dengan gangguan identitas jenis kelamin merasakan kegelisahan yang menetap karena jenis kelamin yang ditanggungnya adalah tidak sesuai. Orang tersebut *preokupasi persisten* (pikiran yang tertuju pada tema-tema tertentu yang cenderung menetap atau sulit dihilangkan) dan keinginan untuk mendapatkan "Pembedahan

¹¹. R.Sjamsuhidayat, dan Wim de Jong, *Buku Ajar Ilmu Bedah*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1997, hal 1012

Penggantian Jenis Kelamin” atau menggunakan hormon untuk mencapai hasil tersebut dinamakan “*Transseksualisme*”.¹²

Gambaran utama dari gangguan identitas jenis kelamin adalah ketidak sesuaian antara alat kelamin dengan identitas jenis (*gender identity*).

Identitas jenis adalah perasaan seseorang tergolong dalam jenis kelamin yang tertentu, dengan perkataan lain kesadaran bahwa dirinya sebagai laki-laki atau perempuan. Identitas jenis merupakan suatu penghayatan pribadi dari peran jenis dan peran jenis adalah penghayatan terhadap masyarakat dari identitas jenisnya.¹³ Peran jenis dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan dan dikatakan oleh seseorang, termasuk gairah seksualnya, untuk menyatakan pada orang lain atau diri sendiri sampai berapa jauh dirinya laki-laki atau perempuan.

Gangguan identitas jenis kelamin jarang terjadi. Hal ini hendaknya tidak dikacaukan dengan fenomena yang lebih sering ditemukan yaitu perasaan “*inadequate*” (tidak sesuai) terhadap pemenuhan harapan diri dari peran jenisnya. Misalnya seseorang merasa alat kelaminnya terlalu

¹². Masyaroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasi Pada Transseksual*, Tesis S2 Magister Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2005, hal.6

¹³. *Ibid.* hal 41

kecil atau kurang aktif, tetapi penghayatan dirinya cukup mantap sebagai laki-laki atau perempuan sesuai dengan alat kelaminnya.¹⁴

2.3.2. Gejala Transseksual

Untuk menentukan apakah seseorang itu mempunyai gangguan identitas jenis transseksualisme, ditetapkan kriteria diagnostik sebagai berikut:¹⁵

- a. Merasa memiliki seksualitas yang berlawanan dengan struktur fisiknya
- b. Keinginan untuk menghilangkan alat kelaminnya dan hidup sebagai lawan jenisnya.
- c. Ia merasa jijik dengan alat kelamin yang dimilikinya
- d. Ada perasaan bahwa letak alat kelaminnya bukan pada tempatnya

Berbagai cara dilakukan untuk mengubah dirinya menjadi seorang perempuan jika ia laki-laki, dan menjadi laki-laki jika ia perempuan. Meskipun pada kenyataannya lebih banyak kasus transseksual laki-laki dari pada perempuan. Keinginan untuk menjadi perempuan bukan hanya terletak pada pakaian semata tetapi juga sikap perilaku dan penampilannya. Keinginan ini relatif melekat dan berlangsung dengan sangat hebat.

¹⁴. Dadang Hawari, *Al'Quran IKJ Dan Kesehatan Jiwa*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1997, hal.405-405

¹⁵. Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Sexual*, CV. Mandar Maju. Bandung, 1990, hal 226

Tidak mudah untuk dimengerti dan dipahami, terutama oleh kalangan non medik, bahwa orang tak senang dengan jenis kelaminnya sendiri dan bahkan menginginkan jenis kelaminnya diganti dengan jenis kelamin lain atau berkeinginan untuk melakukan operasi ganti jenis kelamin. Mereka pada umumnya sangat meyakini bahwa jenis kelamin yang dibawanya sejak lahir itu merupakan kesalahan, mereka merasakan bahwa psikisnya tidak pas dan salah dalam menempati kelamin biologisnya, keadaan tersebut dikenal dengan istilah "*gangguan transseksual*".¹⁶

Ada beberapa kategori gangguan transseksual antara lain sebagai berikut:¹⁷

Pertama, *Transseksual partial* yakni seseorang yang telah memulai proses hormonal dan operasi pengubahan kelamin, namun untuk beberapa alasan telah gagal memenuhi proses tersebut, maka baik laki-laki atau perempuan dikenal sebagai transseksual parsial. Telah diketahui beberapa homoseksual dengan sifat perempuan, dalam rangka menambah penampilan seksual mereka akan menjalani terapi hormon perempuan dan menjalani operasi untuk membesarkan payudara. Mereka kebanyakan hanya berhenti sampai disitu saja. Ada juga perempuan yang menjalani pengecilan payudara dan menjalani terapi hormon laki-laki, namun tidak menjalani operasi ganti

¹⁶. Masyaroh., *Op. cit*, hal 44

¹⁷. Yash, *Transeksualisme (Sebuah Studi Kasus Perkembangan Transseksual Perempuan Ke Laki-laki)*, Penerbit AINI, Semarang, 2003

kelamin. *Kedua, Transseksual sekunder* atau *“Wish-to-be” Transsexuals* kebingungan gender dapat timbul karena situasi stress berbagai hal, selama masa kanak-kanak atau bahkan masa dewasa. Dibawah pengaruh stress beberapa individu dapat mengembangkan sesuatu yang regresif untuk mendapatkan operasi ganti kelamin. Individu-individu ini dikenal sebagai transseksual sekunder.

Adapun tanda-tanda lain dari gangguan transseksual yaitu adanya perasaan tidak nyaman dan tidak puas dengan salah satu anatomi seksnya; berharap dapat berganti kelamin dan hidup dengan jenis kelamin lain; mengalami guncangan yang terus menerus untuk sekurangnya selama dua tahun dan bukan hanya ketika stress; adanya penampilan fisik interseks atau genetik yang tidak normal; dan dapat ditemukannya kelainan jiwa yang sering disebut schizophrenia, yakni semacam reaksi psikotis dengan ciri pengurungan diri, gangguan emosional / efektif serta tingkah laku negativisme.¹⁸

2.3.3. Perkembangan Transseksual

Perkembangan transseksual di bagi dalam tiga fase :

1. Fase *“Transvestif”* atau fase *Cross-dressing*

Pada fase ini transseksual perempuan berlanjut untuk menolak memakai pakaian wanita. Perilaku cross-dressing mereka umumnya diterima atau

¹⁸. Sofwam Dahlan, *Hukum Kesehatan*, ed II, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang 2000, hal 113

ditoleransi oleh orang tua mereka. Mereka yang melakukan cross-dressing adalah sekitar usia 11 tahun. Pada tahap ini mereka disebut tomboy, karena term transvetit tidak terjadi pada wanita, dan karena pemakaian pakaian pria oleh wanita tidak dianggap sebagai hal yang aneh atau normal.

2. *Fase "Homoseksual" (lesbian)*

Setelah pubertas, kebanyakan transseksual perempuan menjadi tertarik secara seksual pada wanita. Ketertarikan mereka disebut sebagai ketertarikan "homoseksual" dimulai lebih awal daripada transseksual laki-laki. Pada tahap perkembangan ini, transseksual perempuan lebih muda ini tidak dapat dibedakan dengan lesbian (homoseksual perempuan). Mereka belum dapat disebut transseksual perempuan karena mereka belum memiliki keinginan yang kuat untuk bisa mendapatkan operasi ganti kelamin. Tahap ini terjadi dimana mereka berusia 17 tahun

3. *Fase Transseksual*

Fase transseksual ini dicapai ketika subjek menjalani hidup dan mengambil peran dari jenis kelamin kebalikan darinya. Sebelum fase ini dicapai, subjek sudah siap untuk mendapatkan operasi ganti kelamin. Transisi dari masa saat mereka dikenal sebagai homoseksual ke fase transseksual tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Setelah proses yang bervariasi dengan perilaku lesbian atau maskulin, transseksual

perempuan mulai mencari tahu tentang operasi ganti kelamin dan menyadari kemungkinan berubah menjadi seorang laki-laki. Hal ini membuat mereka terus berusaha mencari bantuan medis untuk merubah anatomi seks mereka. Pada usia 20, sekitar 90% transseksual perempuan telah mencapai tahap ini, sebuah tahap saat mereka sudah memenuhi semua criteria untuk transseksualisme.

2.3.4. Faktor Penyebab Transseksual

Adapun penyebab dari transseksual ini masih menjadi perdebatan; apakah disebabkan oleh kelainan secara biologis-termasuk di dalamnya kelainan secara hormonal dan kromosom; ataukah disebabkan oleh lingkungan (*nurture*) seperti trauma pada masa kecil; atau karena sering diperlakukan sebagai seorang perempuan pada masa pubertas dengan homoseksual yang kecewa dan trauma; atau trauma pergaulan seks dengan pacar, suami atau istri.¹⁹

Kondisi-kondisi diatas dapat dikatakan sebagai suatu keabnormalitasan atau ketidakwajaran. Berkaitan dengan hal tersebut, beberapa teori tentang keabnormalitas seksual menyatakan bahwa keabnormalan itu timbul karena sugesti masa kecil. Seseorang akan mengalami atau terjangkit abnormalitas seksual karena ada pengaruh luar , misalnya dorongan kelompok tempat ia tinggal, pendidikan orang tua yang menjurus pada benih-benih timbulnya penyimpangan seksual, dan

¹⁹. Zunly Nadia, *Waria Laknat atau Kodrat*, Pustaka Marwa, Yogyakarta, 2005, hal 40

pengaruh budaya yang diakibatkan oleh komunikasi intens dalam lingkungan abnormalitas seksual yang disebut *acquired*.²⁰

Masih berkaitan dengan hal diatas, J. Money berpendapat bahwa abnormalitas seksual itu diperoleh semenjak seseorang lahir. Teori ini disebut dengan *teori congenital*, yaitu munculnya abnormalitas seksual pada diri seseorang bukan karena pengaruh luar.²¹

Sementara itu, dari perspektif medis, pada transseksual ini terdapat kemungkinan disebabkan oleh *predisposisi hormonal, hormon facto-faktor endokrin, konstitusi pembawaan, dan beberapa diantaranya basis biologis pada masa prenatal*, sehingga dapat menumbuhkan perilaku seksual yang meyimpang.²²

Teori yang banyak diterima adalah teori yang dikaitkan dengan perkembangan psikologik, dengan asumsi bahwa semua orang pada dasarnya dilahirkan dengan jenis kelamin netral. Sebagian penderita transseksual sesungguhnya tidak mempunyai masalah anatomi maupun fisiologi, mereka memiliki kelenjar prostat, testis dan penis sebagaimana layaknya laki-laki dan mereka juga dapat melakukan senggama, merasakan

²⁰. Koeswinamo, *Komunikasi Sosial Kaum Minoritas*, The Toyota Foundation, Jakarta. 1993, hal 5

²¹. J. Money, *Component Of Erotism in Man: Cognital Rehearsals*, Grune and Stratton, New York, 1960, hal 210

²². Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, CV. Mandar Maju. Bandung, 1990, hal 229

nikmat dan bahkan orgasme seperti laki-laki normal.²³ Bahwa kemudian secara psikologik menjadi laki-laki atau perempuan adalah karena berbagai variabel; diantaranya adalah dengan siapa lebih dekat bergaul, serta bagaimana kultur yang ada di sekitarnya.²⁴

2.3.5. Tipe-tipe Transseksual

Transseksual dibagi dalam sub tipe yaitu sebagai berikut :²⁵

1. *Transseksual yang aoseksual*, yaitu seorang transseksual yang tidak berhasrat atau tidak mempunyai gairah seksual yang kuat.
2. *Transseksual homoseksual*, yaitu seorang transseksual yang memiliki kecendrungan tertarik pada jenis kelamin yang sama sebelum ia sampai ke tahap transseksual murni.
3. *Transseksual yang heteroseksual*, yaitu seseorang transseksual yang pernah menjalani kehidupan heteroseksual sebelumnya, misalnya pernah menikah.

2.3.6. Penanganan Transseksual

Orang yang mengalami gangguan transseksual adalah orang yang mengalami permasalahan psikis dan perilaku yang kontradiktif, kemudian timbul permasalahan identitas kelamin psikisnya berlawanan dengan organ kelamin biologisnya. Kondisi-kondisi seperti itu merupakan

²³. Sofwan Dahlan, *Hukum Kesehatan (Rambu-rambu bagi Profesi Dokter)*, edisi 2. Universitas Diponegoro, Semarang, 2000, hal 110

²⁴. Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Kontemporer*, Bab "Transgender dan Hukum Operasi Kelamin", Saksi No.20, Bandung 2002

²⁵. Kemala Atmojo, *Kami Bukan Lelaki*, cet II, Pustaka Utama Grafiti, 1986, Jakarta, hal

bagian dari beberapa fenomena dari penyakit kejiwaan, sehingga harus adanya upaya terapi jiwa dan terapi agama untuk memulihkan jiwanya sampai bisa sesuai dengan normal psikis/perilakunya sebagaimana layaknya orang normal lainnya.

Selain hal diatas, terdapat juga metode-metode penanganan transseksual lainnya sebagai tindakan preventif untuk dilakukan operasi kelamin, antara lain :²⁶

A. Menurut standar care The Herry Benjamin International Gender Dysphoria Assocation

Prosedur penanganan transseksual dibagi menjadi tiga tahapan :

1. Subjek ditangani oleh psikolog atau psikiater yang berpengalaman dalam masalah gender. Pada Tahap ini diberikan segala informasi yang harus diketahui dan dibutuhkan oleh subjek, termasuk apa yang mungkin dicapai, prosedur, apa yang tidak mungkin dicapai, dan konsekuensi penyesuaian gender atau operasi yang akan dilakukan.
2. "Two year real life diagnostic test". Disini individu diharuskan untuk menjalani kehidupan total dengan peran gender yang diinginkan selama paling tidak dua tahun. Pada awal masa ini , subjek sudah diberikan terapi hormon yang sesuai dengan gender

²⁶. Yash, *Transseksualisme (Sebuah Studi Kasus Perkembangan Transseksual Perempuan Ke laki-laki)*, Penerbit CV. AINI, Semarang 2003, hal 42-44

yang dimaksud. Selama periode ini subjek terus menjalani konsultasi dengan psikolog. Setiap 3 bulan, Subjek mendapatkan tes fisik dimana semua perubahan fisik dan keluhan dicatat. Perubahan terapi hormon disesuaikan dengan keluhan dan hasil yang tidak memuaskan.

Setelah tercapai hormon selama 18 bulan dan hidup dalam peran gender yang baru, setiap kasus didiskusikan oleh sebuah tim, sebelum operasi diijinkan. Hanya subjek yang mengalami kepuasan atau merasakan terbebaskan dari masalah gendernya, yang diijinkan menjalankan operasi. Jika masih ada keraguan, operasi diundur sampai kondisi yang diinginkan terpenuhi.

3. Jika semua criteria diatas telah dipenuhi, transseksual diijinkan menjalani serangkaian operasi yang dibutuhkan.

B. Menurut standard care di Singapura

Penanganan kasus transseksual dipisah-pisahkan menjadi lima tahapan:

1. Evaluasi awal oleh psikiater atau psikolog untuk mendiagnosa kasus pasien dengan kebingungan gender (gender confusion). Untuk mengidentifikasi transseksual dari jenis lain ("wish-to-be" transseksual atau transseksual sekunder).
2. Usaha psikoterapis untuk mengubah keinginan pasien untuk menjalani operasi ganti kelamin. Untuk membantu pasien

mengatasi masalah yang mungkin membingungkan mereka dan untuk membantu pasien mengenali motif mereka yang sebenarnya dibalik keinginan untuk merubah kelamin mereka.

3. Terapi hormon untuk mengawali perubahan kelamin. Untuk menerangkan pada pasien alasan, strategi dan efek samping yang mungkin terjadi dari terapi hormon. Terapi hormon akan membawa perubahan fisik dan mungkin perubahan psikogenik.
4. Pada akhir terapi hormon, pasien kemudian menginjak pada tahap cross-dressing total.
5. Operasi ganti kelamin itu sendiri

Namun perlu diakui bahwa dalam banyak kasus, metode pengobatan psikodinamik sering tidak membawa hasil yang memuaskan, sehingga tindakan alternatif yang mungkin dan banyak diminati oleh orang dengan gangguan transseksual adalah operasi penggantian jenis kelamin.

2.4. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Islam

2.4.1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Dalam pertimbangan perintah Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW., perkawinan itu diwajibkan bagi seorang lelaki yang memiliki kekayaan yang cukup untuk membayar mahar, memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anak sehat jasmani dan khawatir kalau-kalau tidak menikah itu justru akan menimbulkan perbuatan zina. Perkawinan

yang tidak memiliki kekayaan apapun untuk membiayai hidupnya dan dikhawatirkan kebutuhan seksnya akan menjerumuskannya ke dalam perzinahan.²⁷

Nabi Muhammad SAW. menganggap bahwa perkawinan itu bagi seseorang muslim sebagai separuh ajaran agama karena dengan perkawinan dapat melindungi seseorang dari kekacauan jiwa, perzinahan dan perbuatan yang akan menjerumuskan berbagai tindak kejahatan lainnya. Berbagai tindakan kejahatan itu misalnya timbul fitnah, pertikaian, pembunuhan, perampasan hak milik dan akhirnya akan mengakibatkan rusaknya tatanan kekeluargaan ideal yang sangat dititikberatkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Bagi kaum muslim, Lembaga perkawinan yang berdasarkan kepentingan dan kasih sayang antara pasangan suami isteri merupakan suatu manifestasi yang luhur dari kehendak dan tujuan Illahi. Ini dapat dilihat dari ayat Al-Qur'an berikut :

“ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa cinta dan kasih sayang... (Q.30 : 21) “

Menurut sunah, perkawinan adalah tuntunan hidup yang hakiki. Kehidupan membujang dipandang sebagai suatu kondisi yang

²⁷ A. Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (syariat)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hal 155

penyakit dengki dan cenderung kepada kejahatan.²⁸

Agama Islam menganjurkan dan menggembirakan kawin sebagaimana tersebut karena ia mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia.²⁹

1. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka banyaklah manusia yang mengalami guncangan dan kacau serta menerobos jalan yang jahat.

Dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang halal.

Keadaan yang seperti inilah yang diisyaratkan oleh firman Allah :

“ Di antara tanda kekuasaan-Nya ia ciptakan bagi kamu pasangan dari dirimu sendiri agar kamu hidup tenang bersamanya dan cinta kasih sesama kamu. Sesungguhnya yang demikian itu merupakan tanda-tanda (kekuasaan-Nya) bagi kaum yang berpikir “ (QS.Ar-Rum : 21)

2. Kawin jalan terbaik bagi kebaikan anak-anak, memperbanyak keturunan, kelestarian hidup serta memelihara nasab dengan baik yang memang sepenuhnya diperhatikan oleh Islam, sebagaimana pernah disabdakan Rasulullah SAW :

“ Kawinlah dengan perempuan pecinta lagi banyak anak agar nanti aku dapat membanggakan jumlahmu yang banyak itu dihadapan para Nabi pada hari kiamat nanti “ (HR. Muslim, Abu Daud dan Tarmidzy)

²⁸. Murtadha Muthahhar, *Etika Seksual Dalam Islam*, PT. Lentera Basritama, Jakarta, 1999, hal 9

²⁹. M. Bukhori, *Hubungan Seks Menurut Islam*, PT. Bumi Aksara, 2001, hal 7

3. Dengan perkawinan naluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
4. Perkawinan menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak akan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya, sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi.
5. Perkawinan menimbulkan pembagian tugas, di mana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami isteri dalam menanggung tugas-tugasnya.
6. Perkawinan dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang memang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling tunjang menunjang lagi saling menyayangi akan merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.

Cukup logis Islam menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur berfungsinya keluarga sehingga dengan perkawinan yang sah

inilah kedua belah pihak suami dan isteri dapat memperoleh kedamaian, kecintaan, keamanan dan ikatan kekerabatan.

Tujuan pokok dari perkawinan adalah bersatunya kedua belah pihak, dengan mudah mereka akan mengerti cara untuk saling membantu dalam mencapai tujuan ini. Tujuan pokok ini adalah tujuan yang jauh lebih besar ketimbang keinginan birahi semata-mata. Mereka dapat belajar saling menghargai satu sama lain, mencintai Allah dalam keluarga mereka dan terhadap lainnya, serta mengatasi kesulitan-kesulitan dan kekurangan mereka.

Tujuan perkawinan kedua adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis mendasar manusia dalam rangka keturunan.³⁰ Anak-anak merupakan pernyataan rasa keibuan dan kebapakan. Islam memperhatikan kemungkinan tersedianya lingkungan yang sehat dan nyaman untuk membesarkan anak dan keturunannya. Tanpa kehidupan keluarga yang dituntun dengan tatanan dan akhlak Islami, bagaimana kita dapat mengharapkan seorang anak akan memiliki kesadaran iman dan nilai-nilai Islam.

Dari bahasan awal ini cukup jelas bahwa Islam tidak menyetujui kehidupan membujang dan memerintahkan kaum muslimin agar menikah secara sah. Sebagaimana telah diketahui bahwa tujuan

³⁰. A. Rahman I.Doi. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 153

perkawinan dalam Islam bukan semata-mata untuk kesenangan lahiriah, melainkan juga membentuk suatu lembaga agar lelaki dan perempuan dapat memelihara diri dari kesesatan dan perbuatan tidak benar, melahirkan dan merawat anak untuk melanjutkan keturunan, serta untuk memenuhi kebutuhan seksual yang wajar dan diperlukan bagi terciptanya kesejahteraan dan kebahagiaan.

2.4.2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun nikah merupakan hal-hal yang harus dipenuhi pada waktu melangsungkan perkawinan. Hal tersebut dapat digolongkan ke dalam syarat-syarat formil yang terdiri atas ;

1. Adanya calon mempelai laki-laki dan wanita
2. Harus ada wali bagi calon mempelai perempuan
3. Harus disaksikan oleh dua orang saksi
4. Akad nikah yaitu ijab dari wali mempelai perempuan atau wakilnya dan kabul dari mempelai laki-laki atau wakilnya.

Rukun nikah merupakan bagian daripada hakekat perkawinan, artinya bila salah satu dari rukun nikah tidak dipenuhi akan tidak akan terjadi suatu perkawinan.

Bila tidak ada calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, tidak ada suatu perkawinan. Calon mempelai masing-masing harus bebas dalam menyatakan persetujuannya. Hal ini menuntut konsekuensi bahwa kedua calon mempelai haruslah sudah mampu untuk

memberikan persetujuan untuk mengikat diri dalam suatu perkawinan, dan hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah mampu berpikir mandiri, dewasa dan bebas dari tekanan-tekanan pihak lain diluar dirinya.³¹

Sebagian besar ulama menyatakan, bahwa saksi adalah rukun nikah. Akad nikah yang tidak dihadiri saksi tidak sah. Dasarnya adalah hadist Nabi yang mengatakan : "Tidak ada atau tidak sah nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil ".

Rukun nikah yang keempat yaitu ijab dan kabul, yang merupakan hukum nikah yang menentukan karena dengan diucapkannya ijab (penegasan kehendak untuk mengikatkan diri dalam perkawinan) oleh wali mempelai perempuan atau wakilnya, dan kabul (penegasan penerimaan mengikatkan diri sebagai suami isteri) yang dilakukan mempelai laki-laki atau wakilnya, maka akad nikah secara yuridis mempunyai kekuatan mengikat bagi kedua mempelai dalam arti bahwa perkawinan mereka sudah sah, Jadi ijab kabul merupakan inti dari perkawinan menurut agama Islam.

Syarat-syarat perkawinan menurut agama Islam diperinci ke dalam syarat-syarat untuk mempelai wanita dan syarat-syarat untuk mempelai laki-laki. Syarat-syarat nikah ini dapat digolongkan ke dalam

³¹ Asin, SH, *Status Perkawinan Antar Agama Di Tinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No 1 / 1974*, PT Dian Rakyat, Jakarta, 1986

syarat-syarat materiil dan harus dipenuhi agar dapat melangsungkan pernikahan.

Syarat bagi calon mempelai laki-laki :

1. beragama Islam
- 2. terang laki-laki bukan banci**
3. tidak di paksa (dengan kemauan sendiri)
4. tidak beristri lebih dari empat orang
5. bukan mahramnya bakal isteri
6. tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan bakal isterinya
7. mengetahui bakal isterinya tidak haram dinikahi
8. tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.³²

Syarat bagi calon mempelai wanita :

- 1 beragama Islam
- 2 terang perempuan bukan banci**
3. telah memberi izin kepada wali kepada wali untuk menikahkannya
- 4 tidak bersuami dan tidak dalam masa idah
5. bukan mahram bakal suami
6. belum pernah dili'an (sumpah li'an) oleh bakal suaminya
7. terang orangnya
8. tidak sedang dalam ihram atau umrah.³³

³² Departemen Agama RI. Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Jakarta : *Proyek Pebinaan Sarana Keagamaan Islam Dirjen bimas Islam dan Urusan Haji*, Departemen Agama, 1984, h 38-39

Menurut Benyamin Asri, SH untuk sahnya suatu perkawinan haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :³⁴

1. mempelai perempuan haruslah perempuan yang halal di nikah oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya.
2. Perkawinan itu dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki
3. Ada wali dari mempelai perempuan yang melakukan akad

2.4.4. Perwalian Dalam Perkawinan

Ulama Mazhab Maliki dan ulama mazhab yang lain telah berpendapat bahwa persetujuan untuk menikahkan seseorang tertentu dengan anak asuhannya, sebagai salah satu unsur penting bagi sahnya perkawinan dalam Islam.³⁵ Hal ini dipertegas sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda :

“ Perempuan manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya itu tidak sah dan batal “.

Lebih lanjut Nabi SAW dalam hadisnya menjelaskan peranan dan hak wali dalam perkawinan :

“ Seorang perempuan tidak dapat dinikahkan oleh perempuan dan seorang perempuan tidak dapat dinikahkan oleh dirinya sendiri “.

³³ *Ibid.*, hal 39

³⁴ Benyamin Asri, SH., *Tanya Jawab Hukum Perkawinan Islam*, Penerbit Tarsito, Bandung, 1988, hal 22

³⁵ *Ibid.*, hal 186-187

Apabila ayah atau keluarga dekatnya tidak ada, Raja atau Amir atau penguasa dapat menggantikan wali perempuan itu.³⁶

Dalam pemilihan suami yang cocok sepatutnya diserahkan kepada persetujuan ayah atau wali lainnya yang akan menyelesaikan serta melindunginya dari penyesatan yang dilakukan oleh orang-orang yang hanya mengikuti nafsu belaka.

Selain hal yang disebutkan diatas, pada dasarnya perkawinan itu tergantung kepada persetujuan si gadis, bukan pada izin walinya saja, yang dalam kenyataannya hanya berkewajiban melindunginya. Pada gilirannya keinginan gadis itulah yang harus dilaksanakan.

Nabi Muhammad SAW, telah bersabda :

*“ Janda dan perempuan yang dicerai, tidak dapat dinikahkan sampai izin diperoleh dari mereka. Anak gadis tidak boleh pula dinikahkan sampai didapatkan perkenannya “*³⁷

Selain itu :

*“ apabila seorang lelaki menikahkan anak gadisnya sedangkan si gadis itu tidak menyukainya, perkawinan itu harus dibatalkan “*³⁸

Dalam perkawinan seorang anak kecil yang masih di bawah umur hukumnya sah, baik anak perempuan itu gadis atau thayyibah. asalkan walinya adalah salah sorang dari ashabah (keluarga dari ayah). Apabila anak itu dinikahkan oleh seorang wali yang bukan ayah atau

³⁶. Bukhari 67 : 41

³⁷. Bukhari 67 : 42

³⁸. Bukhari 67 : 43

kakaknya sendiri, setelah dewasa perempuan itu berhak menolak perkawinan tersebut. Sekalipun si ayah memaksa menikahkan anaknya yang tidak sesuai dengan keinginan si anak, setelah dewasa anak perempuan itu dapat membatalkan perkawinan tersebut kalau memang si gadis tersebut sangat menghendaki perceraian. Seorang gadis kecil juga demikian, apabila setelah dewasa dia mendapatkan bahwa pasangannya itu tidak cocok, perkawinan itu dapat dibatalkan.³⁹

2.4.5. Akibat Hukum Dalam Perkawinan

Adanya suatu perkawinan akan menimbulkan berbagai akibat hukum. Ada tiga akibat hukum yang penting yaitu : hubungan suami-isteri, hubungan orang tua dengan anak dan mengenai harta benda.

a. Hubungan suami-isteri

Pokok akibat hukum setelah terjadinya suatu perkawinan adalah hubungan antara suami dengan isteri, terutama menyangkut soal hak dan kewajiban. Persamaan hak dan kewajiban suami-isteri merupakan suatu prinsip yang sudah menjadi suatu ketentuan dan tidak dapat lagi disangkal lagi oleh siapapun.

Suatu batasan yang terdapat dalam prinsip persamaan hak dan kewajiban suami-isteri pada pokoknya hanya dapat diakui apabila hal ini yang diakibatkan oleh suatu perbedaan jenis kelamin yang jelas dan tegas antara wanita dan pria.

³⁹. Abu Daud, 12 : 25

Antara suami-isteri diberikan hak dan kedudukan yang seimbang baik dalam kehidupan rumah tanggamaupun pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Kedudukan suami dalam rumah tangga yakni sebagai kepala rumah tangga, sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga. Sebagai kepala rumah tangga suami berhak menetapkan tempat tinggal atau kediaman yang tetap yang merupakan tempat kediaman bersama.⁴⁰

Dalam pembinaan rumah tangga itu diperlukan saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang merupakan ketentuan-ketentuan yang sudah seharusnya sebab tanpa persyaratan tersebut akankah tercapainya keharmonisan rumah tangga tersebut.⁴¹

Dalam hukum Islam, pasangan suami-isteri beriman dan beramal shalih harus memiliki wawasan yang luas. Caranya adalah dengan menggunakan waktu senggang untuk mendalami ajaran Islam dan mencerdaskan melalui ajaran itu bagi generasi muslim sebagaimana mereka menanamkan kebudayaan Islam yang baik terhadap anak-anak mereka.⁴²

⁴⁰. Martiman Prodjohamidjojo, SH, *Tanya Jawab Mengenai UU Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Disertai Yurisprudensi*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hal 34

⁴¹. Prof. DR. Lili Rasjidi, SH, LLM, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991 hal 127

⁴². Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Kado Perkawinan*, Pustaka Azzam, 2004, hal. 309

Persamaan yang lain adalah dalam hal melakukan perbuatan hukum. Suami-isteri sama-sama berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Umpamanya seorang isteri dapat saja mengadakan perjanjian jual beli dan lain-lain perbuatan hukum sendiri tanpa memerlukan bantuan atau pendampingan dari suaminya. Bahkan diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya.

Berdasarkan kodrat dan untuk pembagian kerja, maka antara suami dan istri diberikan perbedaan. Suami dibebani kewajiban untuk melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁴³ Dinyatakan dengan tegas bahwa suami adalah “kepala keluarga” sedangkan isteri adalah “ibu rumah tangga”. Isteri sebagai ibu rumah tangga tentulah harus mengatur urusan rumah tangga itu dengan sebaik-baiknya.

b. Hubungan orang tua dan anak

Dalam hal perkawinan melahirkan anak, maka kedudukan anak serta bagaimana hubungan antara orang tua dengan anaknya itu menjadi persoalan.

Dengan dilangsungkannya perkawinan maka suami-isteri terikat satu sama lain dengan kewajiban akan memelihara dan mendidik

⁴³. K. Wamijik Saleh, SH, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, 1980, hal 34

anak-anak mereka. Mengenai pengawasan orangtua ini dalam agama Islam terdapat dua perbedaan :⁴⁴

1. *Hadhanah* :

pemeliharaan seorang anak (person) yang belum dewasa, yaitu yang meliputi pemeliharaan badannya, pemberian tempat tinggal, pemberian pendidikan dan sebagainya.

2. *Wilayat al-mal* :

pemeliharaan yang meliputi kekayaan yang dimiliki oleh sianak dan terhadap kepentingan yang ada hubungannya dengan kekayaan sianak itu.

Ditentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan terus walaupun perkawinan antara orangtua itu putus. Kekuasaan itu juga meliputi untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Kekuasaan tersebut dapat dicabut atas permintaan orang tua, keluarga anak dalam garis keturunan ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan alasan kalau orang tua

⁴⁴. Djoko Prakoso, SH., I Ketut Murtika, SH., *Azaz dan Hukum Perkawinan di Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal 143

tersebut sangat melalaikan kewajibannya atau berkelakuan buruk sekali.⁴⁵

Pembatasan lain terhadap kekuasaan orang tua adalah larangan terhadap orang tua untuk memeindahkan atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki.

Kewajiban anak terhadap orangtua pertama kali adalah menghormati dan mentaati kehendak orangtua yang baik. Apabila anak telah dewasa maka berdasarkan kemampuannya anak tersebut wajib memelihara orangtuanya.

c. Mengenai harta benda

Hukum Islam adalah merupakan system yang peraturannya sederhana. Hukum Islam tidak terdapat suatu campur barang antarakekayaan suami dengan kekayaan isteri.

Hukum Islam menganggap bahwa harta benda milik suami dan harta benda milik isteri satu sama lain adalah terpisah. Dengan kata lain bahwa harta benda yang mereka milik, yang masing-masing dibawa pada waktu melakukan perkawinan adalah tetap menjadi milik masing-masing. Demikian pula halnya dengan harta benda yang masing-masing peroleh selama berlangsungnya perkawinan mereka sebagai penghasilan dari pekerjaan atau sebagai penghibahan dari orang lain, atau hasil dari

⁴⁵. *Opcit.*, hal 35

pembeliannya dan lain sebagainya tetap terpisah satu dari yang lain atau tidak dicampur, artinya bahwa si suami tidak ada hak atas harta benda kepunyaan si isteri, dan demikian sebaliknya.

Dengan hal ini dapat pula mempermudah mengenai siapa yang harus mengurus harta benda itu atau memeliharanya, ataupun menjualnya. Jadi kekuasaan terhadap harta benda itu tetap berada pada pihak yang memiliki harta benda itu. Apabila suami atau isteri masing-masing ingin mempergunakan barang-barang suami atau isteri, maka dalam hal ini suami atau isteri atas dasar suatu perjanjian antara mereka, yaitu perjanjian pinjam meminjam yang biasanya dilakukan dengan cara diam-diam.⁴⁶

Dalam hukum Islam terdapat ketentuan bahwa seorang suami dapat dengan mudah untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum dengan tidak harus meminta bantuan atau kuasa dari suaminya, demikian pula mengenai harta benda milik isteri itu.

Selanjutnya ditentukan apabila perkawinan putus maka tentang harta benda bersama, dinyatakan diatur menurut hukumnya masing-masing. Adapun yang dimaksud dengan "hukumnya" itu adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.

⁴⁶. Opcit., hal 167

2.4.5. Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan adalah terjadi setelah suatu perkawinan itu berlangsung. Pembatalan perkawinan itu disebabkan apabila di antara kedua belah pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk berlangsungnya suatu perkawinan.

Bagi golongan orang-orang Islam Indonesia, pegawai dari kementerian Agama senantiasa melakukan pengawasan terhadap berlangsungnya suatu perkawinan, agar suatu perkawinan benar-benar tidak melanggar larangan dari peraturan-peraturan hukum Islam.⁴⁷ Dalam hukum Islam perkawinan dapat dibatalkan apabila adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan.⁴⁸

Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilaksanakan. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.⁴⁹ Keputusan hakim terhadap pembatalan itu dianggap bahwa perkawinan itu tidak sah yang seolah-olah tidak pernah terjadi sama sekali suatu perkawinan.

⁴⁷. Djoko Prakoso, SH dan I Ketut Murtika, SH, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta, hal 88

⁴⁸. Moh. Idris Ramulyo, SH.,MH, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hal 87

⁴⁹. *Op cit.*, hal 88

Permohonan pembatalan itu dapat diajukan oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri, suami atau isteri, pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang, para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan.⁵⁰

2.4.6. Putusnya Perkawinan

Di dalam hukum Islam yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan adalah sebagai berikut :⁵¹

a. Kematian

Bagi seorang isteri yang ditinggal mati suaminya haruslah menjalani masa berkabung adalah 4 bulan 10 hari. Selama masa iddah perempuan yang ditinggalkan mati suaminya tidak diperkenankan memakai pakaian ataupun perhiasan yang mencolok dan yang dapat menarik perhatian serta tidak menunjukkan rasa berkabung atas kematian suaminya.

b. Talak

Talak adalah pemutusan hubungan perkawinan atas kehendak suami karena tidak tercapainya syariat dalam perkawinan sebagaimana yang diharapkan.

⁵⁰. *Op cit.*, hal 87

⁵¹. Benyamin Asri, SH., *Tanya Jawab Hukum Perkawinan Islam*, Penerbit Tarsito. Bandung, 1988, hal 50-55

Pedoman talak menurut hukum Islam adalah sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya agama Islam itu mempersempit perceraian. Maksudnya adalah agama Islam hanya memperbolehkan talak dalam keadaan yang benar-benar terpaksa atau mendesak.
2. Apabila salah satu di antara suami atau isteri melalaikan kewajibannya (nusyuz), hendaknya tidak tergesa-gesa untuk memutuskan hubungan perkawinan melainkan di upayakan dahulu penyelesaian yang sebaik-baiknya.
3. Bilamana perselisihan antara suami-isteri itu sudah mengkhawirkan dan menjurus pada perceraian, maka hendaknya penyelesaian dengan cara mengangkat hakam atau wasit dari keluarga ke dua belah pihak, yang akan mengusahakan semaksimal mungkin agar suami-isteri itu dapat rukun kembali.
4. Bilamana perceraian terpaksa dilakukan dan talak benar-benar terjadi, maka para keluarga (hakam) harus mengusahakan agar suami-isteri itu dapat rujuk kembali.
5. Seandainya talak benar-benar terjadi, maka hubungan baik di antara bekas suami-isteri itu hendaknya senantiasa dijaga dan bahkan dipupuk.

Adapun alasan-alasan yang dapat diajukan untuk menjatuhkan talak yaitu sebagai berikut :

1. Suami atau isteri mandul, sehingga tidak dapat melahirkan keturunan sedangkan salah satu di antara mereka benar-benar mengharapkan keturunan.
2. Isteri mempunyai kelainan atau penyakit sehingga tidak dapat melakukan hubungan suami isteri atau tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
3. Mempunyai perbedaan sifat dan watak di antaranya keduanya yang tidak mudah untuk diserasikan sehingga mereka selalu bertengkar dan tidak dapat hidup tentram dan damai.
4. Bilamana suami tidak memberi nafkah atau tidak memperhatikan kepentingan isteri atau bertindak sewenang-wenang terhadap isterinya.

c. Fasakh

Fasakh berarti merusak, membatalkan, mencabut atau menghapuskan. Yang dimaksud fasakh di sini adalah merusak atau menghapuskan perkawinan yang telah berlangsung. Fasakh ini merupakan salah satu yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan. Fasakh dapat terjadi karena sebab-sebab antara lain : murtad, adanya hubungan susuan yang diketahui setelah perkawinan berlangsung, salah seorang melakukan zina, dan sebagainya.

Dilihat dari segi jelas atau tidaknya hal-hal yang menyebabkan terjadinya fasakh, maka fasakh itu dapat kita bagi menjadi dua :

1. Fasakh yang memerlukan keputusan pengadilan, yaitu apabila fasakh itu disebabkan oleh hal-hal yang kurang jelas, misalnya isteri musyrik dan sebagainya.
2. Fasakh yang tidak memerlukan putusan pengadilan, yaitu fasakh yang disebabkan oleh hal-hal yang telah jelas, misalnya karena hubungan mahram di antara suami-isteri atau karena adanya hubungan susuan dan sebagainya.

Seorang isteri dapat mengajukan fasakh melalui pengadilan dengan alasan-alasan yaitu sebagai berikut :

1. apabila suami sakit ingatan atau gila
2. suami kehilangan kemampuan untuk melakukan hubungan suami-isteri
3. suami tidak mampu memberikan nafkah
4. suami menghilang atau hilang tanpa berita dalam waktu yang cukup lama tanpa diketahui di mana ia berada atau tanpa diketahui apakah ia masih hidup atau sudah meninggal.

Isteri yang diceraikan karena fasakh tidak mungkin dirujuk oleh suaminya.

Suami akan dapat kembali hidup berumah tangga dengan bekas isterinya dengan melakukan akad nikah baru.

d. Li'an

Li'an adalah sumpah laknat Tuhan, maksudnya adalah sumpah yang di dalam perkataannya terdapat pernyataan untuk bersedia menerima laknat Tuhan. Dasar hukum sumpah li'an adalah Al Qur'an surat An-Nuur ayat 6 dan 9 :

“ Suami menuduh isterinya berbuat zina, sedangkan ia tidak mempunyai saksi kecuali dirinya sendiri , hendaklah salah seorang diantara mereka menyatakan persaksian kepada Allah sebanyak 4 kali bahwa, tuduhannya itu adalah benar dan sumpah yang kelimanya menyatakan bahwa kesediaan menerima laknat Allah apabila ia berdusta atas tuduhan itu; Hukuman zina dapat terhindar dari isteri apabila isteri itu menyatakan persaksian kepada Allah empat kali, yang menyatakan bahwa suaminya termasuk orang yang dusta dan yang kelima menyatakan kesediaan menerima murka atau laknat Tuhan apabila tuduhan itu ternyata benar “.

Akibat dari sumpah li'an itu sendiri bahwa suami dapat terhindar dari hukuman menuduh zina, isteri dikenai hukuman zina, putusanya hubungan perkawinan, anak tang dilahirkan isteri hanya bernazab kepada ibunya, isteri menjadi haram selamanya bagi suami dan tidak dapat kembali hidup bersuami-isteri.

e. Nusyuz dan Syiqaq

Yang dimaksud dengan nusyuz ialah membangkang. Pengertian membangkang di dalam hukum perkawinan ini adalah membangkang atau tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban di dalam hidup perkawinan atau rumah tangga.

Dilihat dari segi yang melakukan nusyuz, maka nusyuz ini dapat kita bagi menjadi dua, yaitu :

1. nusyuz yang dilakukan pihak suami, misalnya tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap isteri dan sebagainya.
2. nusyuz yang dilakukan oleh isteri, misalnya tidak mau taat pada suami, keluar rumah tanpa izin suami dan sebagainya.

Syiqaq ialah perselisihan atau retak. Syiqaq dalam kaitannya dengan perkawinan adalah tidak adanya kesesuaian di antara suami-isteri selama hidup berumah tangga (sebagai suami-isteri) yang membawa kekhawatiran akan terjadi perceraian di antara mereka.

Dilihat dari penyebab terjadinya syiqaq, maka syiqaq dapat kita bagi menjadi tiga, yaitu :

1. Syiqaq yang dilakukan suami-isteri.

Misalnya karena adanya perbedaan watak/pembawaan yang tidak mungkin untuk disatukan diantara mereka.

2. Syiqaq yang dilakukan suami.

Misalnya, perlakuan kasar atau semena-mena dari suami terhadap isterinya yang dirasakan amat berat bagi si isteri untuk hidup dalam perkawinan itu.

3. Syiqaq yang dilakukan oleh isteri

Misalnya, isteri nusyuz dan suami tidak dapat lagi mengatasi sikap nusyuz isterinya tersebut dengan berbagai upaya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan sebuah metode untuk menemukan kebenaran yang juga pemikiran kritis. Penelitian juga dapat diartikan sebagai pencarian yang terus menerus terhadap sesuatu yang diteliti. Berdasarkan hal itu maka metode penelitian yang dipakai harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.

Dalam menyusun tesis ini supaya berhasil dengan baik dan teliti serta lancar, maka pengumpulan data yang harus diperlukan terhadap penyusunan tesis ini menggunakan beberapa metode penelitian yang lazim dipergunakan dalam penelitian hukum. Hal ini dimaksudkan agar penulis dalam menyusun tesis bisa menggunakan metode yang tepat, sehingga tesis ini dapat disusun dengan baik.

3.1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian tentang “Perubahan Kelamin Bagi Transseksual Dalam Kaitannya Dengan Perkawinan Menurut Hukum Islam “ adalah metode yuridis normatif atau legal research, yaitu suatu penelitian yang bersifat doktrinal, peninjauannya ditekankan dari segi yuridis. Penulis akan menggunakan data-data sekunder, dengan jalan inventarisasi pendapat-pendapat ahli, artikel-artikel, tulisan-tulisan ilmiah dan referensi lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti, teori-teori hukum, pendapat teoritis bidang hukum serta sebagai pelengkap sesuai dengan objek yang diteliti yaitu pendapat para dokter. Kesemua ini dimaksudkan untuk

memendapatkan gambaran yang lengkap tentang permasalahan yang diteliti. Dari data-data yang terhimpun selanjutnya akan dibahas secara lebih mendalam dari segi hukumnya.

3.2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian deskriptif analitis yaitu memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan data-data mempunyai relevansi, khususnya dalam perubahan kelamin bagi transseksual dalam kaitannya terhadap perkawinan menurut hukum Islam. Hal tersebut kemudian dibahas atau dianalisis menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat peneliti sendiri dan terakhir menyimpulkannya.⁵²

3.3. Metode Pengumpulan Data

Untuk membahas dan menganalisa permasalahan yang telah dirumuskan, penulis menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder dengan cara sebagai berikut :

1. Penelitian lapangan (field research), merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data primer yang dilakukan di medan (lokasi) penelitian.
2. Penelitian kepustakaan (library research), merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data sekunder, dengan jalan inventarisasi pendapat-pendapat ahli, artikel-artikel, tulisan-tulisan ilmiah dan referensi lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti.

⁵² .Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999, Hal 26-27

Untuk memperoleh data primer sebagai pendukung data sekunder, penulis menggunakan metode interview/wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Wawancara yang dilakukan merupakan wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan cara mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan sebagai pedoman, namun demikian masih dimungkinkan variasi-variasi pengajuan pertanyaan yang dengan situasi dan kondisi ketika wawancara dilaksanakan.⁵³ Dari metode wawancara ini diharapkan dapat diperoleh keterangan-keterangan secara langsung dan jelas tentang hal-hal yang berkaitan dengan perubahan kelamin bagi transseksual dalam kaitannya dengan perkawinan menurut hukum Islam.

3.4. Analisa Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁵⁴ Dengan demikian terlebih dahulu akan dilakukan pengkajian terhadap data-data yang diperoleh selama penelitian, kemudian dipadukan dengan teori yang melandasinya, untuk mencari dan menemukan hubungan atau relevansi data yang diperoleh dengan landasan teori yang digunakan, sehingga dapat menggambarkan dan memberikan kesimpulan umum mengenai perubahan

⁵³. Strisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid II, Andi Offset, Yogyakarta, 1989, hal 206

⁵⁴. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1984, hal 250

kelamin bagi transseksual dalam kaitannya dengan perkawinan menurut hukum Islam.

3.5. Metode Penyajian Data

Data primer yang berupa hasil penelitian lapangan dan data sèkunder yang berupa hasil penelitian kepustakaan telah terkumpul disajikan dalam bentuk keterangan dan ulasan-ulasan yang disusun secara teratur dan sistematis untuk mempermudah pengklasifikasian terhadap bahan-bahan yang ditulis. Adapun dalam penelitian ini data disajikan dalam bentuk keterangan dan ulasan-ulasan yang disusun secara teratur dan sistematis untuk mempermudah pengklasifikasian terhadap bahan-bahan yang ditulis. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dianalisa kemudian disajikan dalam bentuk uraian yang merupakan gambaran dari data yang telah diperoleh.

3.6. Populasi dan sampel

Dalam penelitian ini populasinya adalah peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, pendapat-pendapat para ahli serta data lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

Adapun teknik sampling yang diterapkan pada penulisan ini, yaitu teknik non random sampling, sehingga tidak semua individu dalam populasi mendapat peluang yang sama untuk menjadi sample. Hal ini mengingat keterbatasan yang ada pada penulis, baik dari segi waktu, biaya maupun tenaga. Sedangkan penentuan sample yang dipergunakan ialah secara purposive sampling atau sample bertujuan.

Dalam purposive sampling pemilihan sekelompok subjek didasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama dari obyek yang diteliti dan penentuan karakteristik populasi yang dilakukan dengan teliti melalui studi pendahuluan.⁵⁵

Keuntungan yang bisa didapat dari penerapan purposive sampling antara lain :

1. Lebih sederhana dan tidak banyak menelan biaya.
2. Menjamin keinginan peneliti untuk memasukan unsur-unsur tertentu ke dalam sampelnya.⁵⁶

Responden-responden yang dipilih dalam menunjang penelitian ini adalah :

1. Pengurus MUI Jawa Tengah
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Wali Songo Semarang
3. Pihak hukum kedokteran yang dianggap mengetahui tentang perubahan kelamin bagi transseksual.

⁵⁵. *Ibid.*, hal 196

⁵⁶. *Ibid.*, hal 196

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Perubahan Kelamin Bagi Transseksual Menurut Hukum Islam.

4.1.1. Operasi Kelamin Dalam Dunia Kedokteran

Berbicara tentang perubahan kelamin bagi transseksual maka hal ini berkaitan dengan perkembangan teknologi operasi plastik khususnya operasi kelamin yang semakin meningkat di Indonesia. Rumah Sakit Dr. Kariadi / FK Undip, Semarang merupakan salah satu dari lima (5) rumah sakit di Indonesia (RS. Pringadi Medan, RS. Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta, RS. Hasan Sadikin Bandung, RS. Dr. Kariadi Semarang, RS. Dr. Sutomo Surabaya) yang mendapat rekomendasi dari Departemen Kesehatan RI sebagai center untuk melaksanakan operasi kelamin, pernyataan ini dikemukakan oleh dr. Ardy Santosa, Sp. BU wakil ketua tim operasi RS Dr. Kariadi / FK Undip Semarang⁵⁷

Sejak akhir tahun 2004 RS. Dr. kariadi khusus untuk operasi perubahan kelamin bagi transseksual sudah tidak dilakukan lagi., sebagaimana dinyatakan oleh Prof Dr. Sultana MH. Faradz Ph.D selaku konsultan genetika tim operasi kelamin ketua Kelompok Studi Ambigius

⁵⁷. Masyaroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasi Pada Transseksual*, Magister Hukum. Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2005, hal 71

Genetalia Fakultas Kedokteran Undip / RS Dr. Kariadi Semarang.⁵⁸

Menurutnya ada sisi medis maupun non medis yang menjadi pertimbangan. Dalam melakukan operasi kelamin pada transseksual banyak pengorbanannya. Minimnya dana untuk operasi transseksual menyebabkan pihak tim medis yang berusaha mencari dana melalui sponsor. Selain itu permasalahan sosial yang akan timbul pasca operasi kelamin. Hal inilah yang menjadi alasan bagi RS Dr. Kariadi Semarang untuk tidak menangani lagi operasi kelamin pada transseksual.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam dunia kedokteran modern termasuk RS Dr. Kariadi secara garis besar ada 3 macam bentuk atau istilah operasi kelamin. Yang pertama adalah operasi perbaikan kelamin seperti pada pasien hipospadia, yang kedua adalah operasi penyesuaian kelamin seperti pada pasien ambigius genitalia atau intersek dan yang ketiga adalah operasi perubahan kelamin pada pasien transseksual.

1. Operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin.

Operasi tersebut dilakukan terhadap kelainan congenital, seperti pada anak atau penderita yang sejak lahir memiliki kelainan atau penderita yang sejak lahir memiliki kelainan atau gangguan organ kelamin. Contohnya yang sering ditemukan adalah pada kasus

⁵⁸. *Ibid*, hal 72

hipospadia, yakni penderita yang dzakar (penis) nya atau farad (vagina) nya tidak sempurna saluran organ kelamin luarnya atau tidak pada tempatnya.

2. Operasi penyesuaian kelamin atau operasi memperjelas salah satu jenis organ kelamin.

Operasi ini adalah operasi kelamin yang dilakukan dengan cara membuang salah satu dari kelamin ganda, yang dilakukan terhadap anak atau penderita yang mempunyai organ genitalia eksterna (alat kelamin luar) yang tidak jelas apakah laki-laki atau perempuan, atau terhadap penderita yang mempunyai bentuk kedua jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan sekaligus (terdapat dua organ kelamin luar sekaligus yaitu penis dan vagina), yang kemudian dikenal dengan istilah "*ambiguous genitalia / hermaphrodit / interseks*".

3. Operasi penggantian kelamin

Operasi ini merupakan operasi kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelamin biologis normal apakah sebagai laki-laki atau perempuan, tetapi dalam pertumbuhan dan perkembangannya selanjutnya mengalami permasalahan psikis dan perilaku yang kemudian timbul permasalahan identitas kelamin psikisnya berlawanan dengan organ kelamin biologisnya, kondisi ini yang kemudian dikenal dengan istilah "*Transseksual*".

4.1.2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasi Kelamin

Memang tidak ditemukan nash yang detail, baik dalam Al Qur'an maupun dalam Al Hadist, tentang larangan atau kebolehan operasi kelamin. Hal ini sangat dimaklumi oleh karena pada zaman Nabi Muhammad SAW. Teknologi medis mengenai operasi belum dikenal, termasuk operasi kelamin. Al Qur'an sendiri semua khitabnya hanya ditujukan kepada manusia laki-laki dan perempuan dan tidak mengenal istilah khuntsa dalam ayat-ayatnya.⁵⁹ Ini berarti ajaran Islam tidak lengkap. Terhadap persoalan-persoalan baru (*waqi'ah al'ashriyyah*), yang belum ada kejelasan status hukumnya, Nabi Saw mempersilahkan kepada umat Islam agar dilakukan ijtihad, yaitu berfikir secara sungguh-sungguh untuk menemukan kebenaran (hukum) dengan tetap berpegang kepada sumber utama (Al Qur'an dan Al Hadist).

Untuk memperjelas pembahasan dan alasan serta tujuan operasi kelamin dalam rangka mengambil sikap dan kebijakan yang berkaitan dengan aspek hukum khususnya perspektif hukum Islam, perlu diketahui kualifikasi permasalahan dari operasi kelamin tersebut. Secara garis besarnya operasi kelamin ada beberapa kriteria yaitu :

⁵⁹. Nur Khoirin YD, *Operasi Kelamin Dalam Perspektif Hukum Islam*, Al-Hakam, IAIN Walisongo, volume XV/Edisi I/April 2004, hal 102

1. Operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin.

Operasi tersebut dilakukan terhadap kelainan congenital, seperti pada anak atau penderita yang sejak lahir memiliki kelainan atau penderita yang sejak lahir memiliki kelainan atau gangguan organ kelamin. Contohnya yang sering ditemukan adalah pada kasus hipospadia, yakni penderita yang dzakar (penis) nya atau farad (vagina) nya tidak sempurna saluran organ kelamin luarnya atau tidak pada tempatnya.

Operasi terhadap gangguan atau penyakit pada organ atau alat kelamin luar yang memberikan manfaat besar bagi kesehatan penderita, dimana operasi tersebut tidak mengganti jenis kelamin (alat kelamin luar). Tetapi lebih merupakan perbaikan dan penyembuhan dari penyakit congenital yang ada pada penderita hipospadia tersebut.

Dalam prespektif hukum Islam, dinyatakan oleh Dr.H. Muchoyyar HS.MA (pengurus MUI wilayah Jawa Tengah)⁶⁰ jika operasi tersebut bisa diatasi dengan medis dan memberikan manfaat besar bagi kesehatan, operasi tersebut diperbolehkan. Menurutny lebih melihat penentuan hasilnya cenderung ke mana apakah lebih banyak maslahat (manfaat) daripada masfadatnya (kerusakan) atau sebaliknya

⁶⁰ M. Muchoyyar, *Wawancara Pribadi*, Kantor MUI Jawa Tengah, Semarang, 13 Juni 2005

karena Islam memandang realitas apakah lebih banyak manfaat atau lebih banyak masfاداتnya.

Dari pernyataan diatas bahwa pada kasus hipospadia ini, yang dialami oleh orang sejak lahir tidak normal organ kelaminnya atau memiliki cacat pada organ kelaminnya, jika ia menginginkan operasi kelamin dengan melihat maslahatnya lebih besar daripada masfاداتnya adalah tidak ada masalah atau boleh karena operasi tersebut bersifat memperbaiki atau menyembuhkan organ kelamin yang cacat atau yang karena ada kelainan anatomis. Berdasarkan alasan tersebut diatas dasar untuk melakukan operasi kelamin yakni membawa maslahat / manfaat yang lebih besar untuk kesehatan fisik dan mental sekaligus merupakan pengobatan bagi penyakit yang memang sejak lahir tidak normal jenis kelaminnya, maka hal ini diperbolehkan dalam Islam.

Menurut Hasanaian Muhammad Makhluḥ (fuqaha” Mesir), operasi kelamin yang bersifat tashih atau takmil (perbaikan dan penyempurnaan) diperbolehkan secara hukum, dan bahkan dianjurkan. Jika seseorang mempunyai kelainan kelamin seperti tidak memiliki lubang kecing pada vagina atau penis, maka operasi untuk memperbaiki atau menyempurnakan agar menjadi normal adalah suatu keharusan. Karena kelainan kelamin sama halnya penyakit yang harus diobati.⁶¹

⁶¹. *Eksiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hal 130

Orang yang mempunyai kelainan kelamin sejak lahir akan menemui problem psikis dan social dimasyarakat. Mereka biasanya tersisih dari kehidupan yang normal, dan cenderung menempuh jalan hidup menyimpang seperti melacur atau melakukan homoseks. Oleh karena itu operasi kelamin sangat dianjurkan. Operasi kelamin akan membawa masalah dan menolak masfadat.

Dalam pandangan Islam segala hal yang di kategorikan ke dalam penyakit maka wajib untuk diobati. Wajib hukumnya bagi seseorang yang menderita penyakit agar berikhtiar mencari obat untuk kesembuhannya. Islam sangat memperhatikan masalah kesehatan fisik, mental dan kesehatan lingkungan. Hal ini dapat ditemukan dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang merupakan sumber hukum Islam dan menjadi pedoman hidup bagi umat Islam, salah satunya sebagaimana tersebut dalam Hadist Nabi riwayat ahmad bin Hambal :

*" Berobatlah hai hamba-hamba Allah karena sesungguhnya Allah tidak mengadakan penyakit kecuali mengadakan pula obatnya, kecuali satu penyakit yaitu penyakit tua "*⁶²

Dalam kaitannya dengan kasus hipaspodia, operasi kelamin tersebut dapat dijadikan sebagai indikasi untuk berobat dan bersifat suruhan (wajib) karena apabila tidak dilakukan operasi menimbulkan bahaya yang lebih besar dibanding dengan membiarkannya untuk tidak

⁶². Al-Suyuthi, *Al-Jami Al-Shaghir*, vol II, Mustafa al-Babi al-hababi wa-Auladuh, 1954, hal.124

dioperasi maka hal ini menjadi alasan untuk lebih diutamakan / didahulukan karena bersifat preventif.

2. Operasi penyesuaian kelamin atau operasi memperjelas salah satu jenis organ kelamin.

Operasi ini adalah operasi kelamin yang dilakukan dengan cara membuang salah satu dari kelamin ganda, yang dilakukan terhadap anak atau penderita yang mempunyai organ genitalia eksterna (alat kelamin luar) yang tidak jelas apakah laki-laki atau perempuan, atau terhadap penderita yang mempunyai bentuk kedua jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan sekaligus (terdapat dua organ kelamin luar sekaligus yaitu penis dan vagina), yang kemudian dikenal dengan istilah "*ambigus genitalia / hermaphrodit / interseks*". Operasi ini adalah operasi penyesuaian kelamin atau operasi untuk memperjelas salah satu jenis kelamin luar yang disesuaikan dengan jenis kelamin biologi lainnya dan jenis kelamin psikisnya.

Menurut Dr.H. Muhyiddin (sekretaris komisi fatwa MUI)⁶³, dalam agama Islam dikenal adanya istilah khuntsa, orang yang secara faal dan biologis berkelamin ganda. Terhadap Khuntsa sejak dahulu Islam telah memiliki sikap tersendiri berkaitan dengan status jenis

⁶³. Dr. H. Muhyiddin, *Wawancara Pribadi*, Kantor MUI, Komplek Masjid Raya Baiturrahman, Semarang, 7 Juni 2005

kelamin itu lebih dominan, maka ia ditetapkan sebagai jenis kelamin itu lebih dominan, maka ia ditetapkan sebagai jenis kelamin tersebut. Artinya, bila organ kelamin laki-lakinya lebih dominan baik dari segi bentuk, ukuran, fungsi dan sebagainya, maka orang ini meski punya alat kelamin wanita, tetap dinyatakan sebagai pria. Jika terhadap kasus khunsa tersebut dilakukan operasi kelamin, maka harus melihat adanya kecendrungan lebih kearah kemaskahatan (manfaat) atau lebih ke madlarat (bahaya/kerusakan). Bila operasi kelamin tersebut membayva manfaat yang lebih besar, maka hukumnya mubah (boleh), tetapi bila menimbulkan madlarat maka hukumnya bias tidak boleh (haram).

Menurut Al-Dimasyqi, sebagaimana dikutip Hamin Ilyas, dalam fikih, Khunsa dibagi menjadi dua, yaitu : khunsa musykil dan khunsa ghairu musykil⁶⁴. Khunsa musykil adalah seseorang yang sulit ditentukan jenis kelaminnya, karena dia memiliki dua alat kelamin (vagina dan penis) atau pun tidak kedua-duanya. Dalam istilah kedokteran disebut sebagai ambiguous genetalia atau sex ambiguity. Adapun khunsa ghairu musykil adalah seorang khunsa yang mempunyai indikasi kecendrungan jenis lelaki-lakiannya atau jenis keprempuannya atau khunsa yang tidak sulit ditentukan jenis kelaminnya.

⁶⁴. Hamim Ilyas, *Orientasi Seksual Dalam Kajian Islam*, Makalah Dalam Seminar Nasional tentang Seksualitas Dan kekerasan terhadap Perempuan Tanggal 27 -29 Juli 2000, hal 4

Menurut pendapat penulis secara substansial memang tidak ada persoalan tentang khunsa. Dalam pengertian bahwa dia adalah makhluk ciptaan Allah dan bagian dari manusia, yang sederajat dengan manusia yang lain dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Selama ini penetapan hukum yang diberlakukan bagi khunsa di dalam agama Islam ditentukan keadaanya secara lahir atau pada indikasi fisik, bukan kepada jiwa.

Selain kasus *khunsa* yang terdapat didalam fikih Islam, ada juga kasus hermaprodit. Pada kasus hermaprodit, jika seseorang yang mempunyai kelamin luar dua jenis (laki-laki dan perempuan), lalu dilakukan operasi untuk mematikan salah satunya, maka setelah tim ahli (tim medis) melakukan penelitian secara ilmiah tentang jenis kelaminnya dan telah menemukan hasil penelitian dan dapat menentukan jenis kelaminnya maka :

- a. Operasi yang untuk mematikan alat kelamin luar yang berlawanan dengan alat kelamin dalamnya, maka hukumnya bisah boleh (mubah), dengan alasan lebih besar maslahatnya (manfaatnya) daripada masfadatnya (kerusakannya).
- b. Operasi yang untuk menghidupkan alat kelamin luar yang berlawanan dengan alat kelamin dalam, maka hukumnya bisa tidak boleh (haram) karena hal tersebut cenderung membawa bencana dan

tidak ada hajat (kebutuhan) terhadap hal tersebut adapun status hukum dari kelaminnya sesuai dengan penetapan tim ahli.

Dari pernyataan-pernyataan diatas dapat penulis simpulkan bahwa berdasarkan penjelasan Al'Quran surat alhujurat ayat 13 bahwa Allah menciptakan manusia hanya terdiri dari dua jenis kelamin yaitu pria dan wanita, kejelasan identitas jenis kelamin itu sangat penting. Pada kasus hermaprodit, yang orang tersebut memiliki organ kelamin ganda / dua (penis dan vagina). Berkenaan dengan hal tersebut Islam telah mempunyai pendapat sendiri terhadap status jenis kelaminnya dengan melihat sifat yang lebih dominan dari salah satu jenis kelamin tersebut. Apabila akan dilakukan operasi, maka sebagaimana pernyataan diatas ia boleh melakukan operasi penyesuaian kelamin dengan mematikan organ kelamin yang satu dan menghidupkan organ kelamin yang lain sesuai dengan organ kelamin yang dalam.

3. Operasi penggantian kelamin

Operasi ini merupakan operasi kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelamin biologis normal apakah sebagai laki-laki atau perempuan, tetapi dalam pertumbuhan dan perkembangannya selanjutnya mengalami permasalahan psikis dan perilaku yang kemudian timbul permasalahan identitas kelamin psikisnya berlawanan dengan organ kelamin biologisnya, kondisi ini yang kemudian dikenal dengan istilah "*Transseksual*".

Dalam pandangan hukum Islam, merubah jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya hukumnya haram, karena bertentangan dengan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 19 dan bertentangan pula dengan jiwa Syara'. Ayat Al-Qur'an yang dimaksud adalah :

"....Mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak ". (QS. An-Nisa'(4) : 10).

Dalam syariat Islam dikenal suatu istilah yang berkaitan dengan fenomena diatas yaitu *takhannuts*. *Takhannuts* adalah orang yang berlagak atau berpura-pura menjadi khuntsa, padahal dari segi fisik dia punya organ kelamin yang jelas. Sehingga sama sekali tidak ada masalah dalam statusnya apakah laki-laki atau perempuan. Apabila akan melakukan operasi kelamin, maka pastikan saja alat kelaminnya sebelum operasi, maka statusnya sesuai dengan alat kelamin yang semula.

Hal senada disampaikan oleh Dr. H. Muchoyyar HS, MA selaku pengurus MUI wilayah Jawa Tengah, bahwa operasi kelamin yang dilakukan terhadap kasus transseksual hukumnya haram, hal ini mengandung nilai yang sangat relevan sekali dergan nilai-nilai Islam, Islam melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki termasuk diantaranya ialah tentang bicaranya, geraknya, cara berjalannya, pakaian dan sebagainya.

Demikian juga dengan pernyataan Prof.Dr. H. Ahmad Rofiq, MA sebagai sekretaris MUI Jawa Tengah bahwa tindakan menyerupai penampilan maupun perilaku perempuan atau sebaliknya termasuk ke dalam kualifikasi larangan Islam yang jelas-jelas bertentangan dengan Al-Qur'an, apalagi jika hal tersebut dilakukan dengan operasi kelamin, dimana operasi tersebut sifatnya cuma aksesoris belaka dan tidak bisa berfungsi normal, dalam kacamata syariat tidak membuatnya berganti jenis kelamin. Sehingga statusnya tetap laki-laki meski suara, bentuk tubuh dan seterusnya mirip wanita.

Menurut penuturan dr. Sofwan Dahlan, DSF, kasus transseksual lebih merupakan masalah kejiwaan atau psikologi dan psikiatri, sedangkan secara medis kelamin biologi atau anatominya tidak menunjukkan adanya kelainan, selain itu pasca operasi kelamin bahwa organ kelamin barunya juga tidak bisa berfungsi secara optimal terutama fungsi reproduksi artinya tetap tidak bisa menstruasi dan melahirkan.⁶⁵

Kasus transseksual memang sangat kompleks dalam permasalahan. Adanya beberapa pertimbangan dan alasan yang tarik menarik antara unsur keberatan dari pihak medis maupun pihak keluarga dalam melakukan operasi kelamin yang ada pada si transseksual sendiri. Hal ini memunculkan pula prespektif yang kontradiktif dari berbagai

⁶⁵. Sofwan Dahlan, *Wawancara Pribadi*, Program Pascasarjana Ilmu Hukum, 27 Juni 2005

kalangan yang dapat dijadikan landasan mereka sesuai kondisi dan alasan secara mendasar sedangkan dari hukum Islam sendiri belum banyak ditemukan tulisan yang mengulas mengenai permasalahan tersebut.

Dari pernyataan-pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku, penyerupaan serta perubahan yang dilakukan oleh laki-laki ke perempuan atau perempuan ke laki-laki adalah mengandung adanya nilai larangan atau cenderung kepada keharaman dengan merubah ciptaan Allah SWT. Karena hal ini mengandung unsur pengecoh dan penipuan terhadap orang lain.

Dari beberapa penelitian dan pembahasan diatas hal yang paling mendasar yang mengakibatkan semua perbedaan dalam diri manusia adalah karena penciptaan manusia secara umum melalui proses keterlibatan orang tua dalam proses reproduksi mempunyai pengaruh terhadap bentuk fisik dan psikis seorang anak. Sedangkan pembentukan manusia sebagai makhluk seksual merupakan sebuah proses yang terus berlangsung seumur hidup.

Pada tahap awal perkembangan manusia sebagai makhluk seksual ditentukan oleh aspek biologis dan aspek psikologis. Dr Ismet Yusuf dari bagian psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang menyatakan⁶⁶ bahwa penentuan jenis kelamin (laki-laki atau

⁶⁶. *Suara Merdeka*, Kamis, 29 Januari 2004, hal 1

perempuan) seseorang paling tidak harus memenuhi sepuluh (10) aspek yang jelas, yakni enam (6) aspek biologis dan empat (4) aspek psikologis. Keenam aspek biologis itu adalah susunan kromosom (XX atau XY), alat kelamin (vulva dan vagina atau penis), jenis gonade (indung telur atau testis), alat kelamin dalam (tuba dan uterus atau epididimis dan saluran sperma), hormon seks (estrogen dan progesteron atau testosteron serta tanda kelamin sekunder (pertumbuhan bulu, otot, tulang payudara dan lainnya). Sedangkan empat aspek biologis dimaksud meliputi identitas seksual yang merupakan konsep diri, perilaku gender, orientasi seksual dan perilaku seksual. Selain dari aspek-aspek diatas, penulis juga melibatkan peran orang di dalam proses karakterisasi seks yang sangat berpengaruh besar dalam perkembangan seks.

Membahas tentang operasi kelamin terhadap kasus hipospadia, hermaphrodit dan transseksual berarti membahas tentang seksualitas. Di sinilah akan nampak semakin melihat betapa kompleksnya permasalahan tersebut. Dimana kasus tersebut tidak cukup diselesaikan dengan pendekatan biologi, psikologi, medis, sosiologis, politik dan ekonomi., tetapi juga melalui pendekatan keagamaan khususnya perspektif hukum Islam.

Menurut Dr. Muhibbin MA (Dekan Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang) pada prinsipnya hukum Islam sangat bergantung pada illat (alasan), sebagaimana *kadidah al-hukmu yaduru ma'allilat*

wujudan wa adaman. Sehingga menanggapi persoalan tersebut, harus benar-benar dipertimbangkan illatnya atas dasar masalah dan madarat. Dalam hal ini 10 aspek dalam penentuan jenis kelamin. Bahkan dengan pertimbangan masalah, aspek psikologis menjadi hal yang skala prioritas.⁶⁷

Permasalahan seksualitas sepanjang dilakukan secara normal dalam arti di bingkai oleh moral (agama) dan memenuhi persyaratan kesehatan sebenarnya tidak ada masalah. Seksualitas baru menjadi persoalan negatif dan mencemaskan manakala ia dilakukan menyimpang secara kesehatan (medis) dan moral (agama) karena keduanya saling terkait.

Pada kasus operasi ubah jenis kelamin terhadap transseksual, penulis dapat mengeksplorasi, bahwa hal tersebut cenderung mengarah kepada keinginan duniawi dan cenderung keinginan pribadi yang disertai dengan nafsu semata, maka pada sebagian kasus tersebut diatas yaitu seorang transseksual yang melakukan operasi ubah kelamin merupakan tindakan yang dilarang agama, karena lebih didominasi dengan nafsu birahi yang hanya untuk kesenangan syahwat duniawi saja dan tanpa melihat mafsadat / kerusakannya akan lebih besar daripada maslahat / manfaatnya. Pada hakikatnya penderita transseksual memiliki

⁶⁷. Dr. Muhibin. MA, *Wawancara Pribadi*, IAIN Wali Songo Semarang, 16 Juni 2005

organ / jenis kelamin yang normal atau sempurna. Jika ia mengganti kelamin normalnya karena sifat dan tujuan mengubah ciptaan Allah maka hal yang demikian dilarang menurut hukum Islam. Larangan melakukan operasi ganti kelamin ini didasarkan atas beberapa alasan dan pertimbangan yang rasional sebagai berikut :

Pertama, manusia tidak boleh merubah sunnatullah (ciptaan Allah). Sunnatullah sering juga disebut dengan hukum alam, adalah apa yang telah diciptakan dan ditentukan oleh kemahakuasaan Allah di mana ikhtiar manusia tidak bisa merekayasa atau memilih. Termasuk menjadi sunnatullah adalah penentuan jenis kelamin manusia karena menjadi laki-laki atau perempuan tidak ada pilihan. Meskipun sekarang bisa diusahakan, tetapi hasilnya Allah yang menentukan. Seseorang tidak boleh menyesal karena terlahir sebagai perempuan atau sebaliknya karena menurut pandangan Islam nilai seseorang dihadapan Allah tidak ditentukan oleh jenis kelamin, warna kulit, suku, termasuk wajah yang tampan atau cantik, tetapi ditentukan oleh tingkat ketaqwaannya kepada Allah, ditentukan oleh kualitas individunya.⁶⁸

Sunnatullah merupakan keteraturan yang seimbang, dan jika dirubah atau direkayasa akan menimbulkan ketidakseimbangan. Orang yang suka mengubah ciptaan Allah benar-benar telah diperdaya oleh

⁶⁸. QS. Al Hujarat : 13

syaitan.⁶⁹ Sebagai tindakan preventif agar seseorang tidak mengalami gangguan seksual, maka laki-laki diharamkan bertingkah laku yang menyerupai perempuan.

Kedua, operasi ubah kelamin akan menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan keluarga dan sosial. Karena ia (transseksual) akan mengalami kemandulan tetap dan tidak akan lagi memberikan keturunan, serta tidak dapat pula memenuhi kebutuhan biologis atau seksualnya secara normal; dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga sebab suami / isteri setelah operasi ubah kelamin tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri yang normal. Demikian juga pergaulannya di masyarakat akan mengalami berbagai kendala fisik dan psikologis.

Ketiga, operasi ubah kelamin akan menyulitkan hukum. Dalam hukum Islam, Laki-laki dan perempuan dibedakan dalam banyak hal, seperti dalam ibadah, aqiqah, kewarisan, pernikahan, dan lain-lain. Jika seseorang melakukan ganti kelamin dan berhasil, maka ada kesulitan dia akan diberlakukan hukum bagi laki-laki atau perempuan.

Upaya penyembuhan terhadap orang-orang yang mempunyai kelainan seksual adalah dengan terapi kejiwaan karena secara eksternal fisiologisnya normal hanya saja psikisnya tidak normal karena sikap

⁶⁹. QS. An Nisa' : 119

maupun perilaku yang berlawanan dengan jenis kelaminnya, disamping melalui latihan-latihan. Cairan serta kelenjar endokrin pada saat pertumbuhan yang kritis misalnya pada masa pubertas juga mampu memberikan arah pada dorongan-dorongan serta seksualitas dan perilaku dimorfik⁶⁹ seksual pada manusia. Oleh karena itu harus ada upaya untuk kesehatan mentalnya dengan ditempuh melalui pendekatan keagamaan dan kejiwaan dengan farmakoterapi, agar supaya tidak melakukan tindakan operasi kelamin.

Jika terapi melalui kejiwaan dan keagamaan serta latihan-latihan tidak berhasil, dimana sebagian besar kasus transseksual melakukan operasi ubah kelamin karena adanya kelainan psikologis dan bukan ketidak jelasan jenis kelamin biologis. Menurut dr Ismet Yusuf, kelainan kejiwaan tersebut sangat sulit dirubah jika yang bersangkutan telah dewasa.⁷⁰ Operasi kelamin dapat diijinkan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :⁷¹

1. Untuk keluar dari keadaan darurat (kesulitan yang luar biasa), yaitu sebagai jalan terakhir setelah cara-cara lain dicoba dan tidak berhasil.

⁶⁹. Steadman, *Medical dictionary*, 25 th edition, The First Century, Baltimore USA, 1890-1891, hal 438

⁷⁰. Nur Khoirin YD, *Operasi Kelamin dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Al-ahkam, IAIN Walisongo, Volume XV/Edisi I/April 2004, hal 105

⁷¹. *Ibid.*, hal 106

1. Tujuannya adalah untuk hal-hal yang positif dan maslahat, bukan sekedar memperjelas status sosial yang subjektif apalagi untuk membuka jalan menuju perbuatan yang dilarang.
2. Yang bersangkutan seorang diri, tidak beristri dan punya anak-anak, sebab akan mengurangi hak-hak mereka.

Dari pembahasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa pandangan hukum Islam terhadap kasus operasi ubah jenis kelamin bagi penderita transseksual haram hukumnya. Operasi ubah jenis kelamin bagi penderita transseksual cenderung mengarah kepada keinginan duniawi dan cenderung keinginan pribadi yang disertai nafsu belaka tanpa melihat masfadat/kerusakannya akan lebih besar daripada maslahat/manfaatnya. Penderita transseksual adalah orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan (perkembangan psikologik). Berkenaan dengan itu, maka upaya penyembuhan bagi penderita transseksual adalah melalui terapi kejiwaan.

4.2. Akibat, Hukum Perubahan Kelamin Bagi Transseksual Terhadap Perkawinan Menurut Hukum Islam

4.2.1. Kedudukan Hukum Bagi Transseksual Pasca Operasi

Perubahan kelamin bagi transseksual pasca operasi akan menimbulkan banyak permasalahan yang sebelumnya tidak begitu diperhatikan. Permasalahan itu akan timbul mengenai kedudukan hukum transseksual pasca operasi, diterimanya surat keterangan dari tim dokter

yang berwenang, menerangkan bahwa pasien telah menjalani operasi penggantian kelamin setelah melalui tahap observasi, dan ditujukan kepada pengadilan.

Surat keterangan ini sangat dibutuhkan dalam pemeriksaan di pengadilan apabila pasien yang bersangkutan mengajukan permohonan perubahan status jenis kelamin dan pengurusan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perubahan statusnya. Penetapan Pengadilan terhadap perubahan status kelamin didahului dengan pernyataan “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “, bisa diartikan bahwa penetapan tersebut dibuat atas dasar demi keadilan yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Penetapan ini ditetapkan atas rasa ketuhanan yang dimiliki oleh hakim serta atas penghormatan yang tinggi terhadap rasa ketuhanan (agama) yang dianut oleh pemohon yang mengajukan perkara.

Walaupun penetapan pengadilan dibuat atas rasa Ketuhanan Yang Maha Esa dengan penghormatan yang tinggi terhadap agama yang dianut oleh pemohon, tidak demikian pada pertimbangan hukumnya, dimana tidak satu pun yang mengkaitkan dengan agama yang dipeluk oleh pemohon. Adapun yang menjadi pertimbangan hukumnya oleh hakim, bahwa perubahan jenis kelamin seseorang menurut hukum adalah suatu perubahan yang sangat fundamental dan prinsipil mengenai kedudukan hukum seseorang, peristiwa perubahan jenis kelamin

merupakan persoalan baru dalam masyarakat sehingga belum diatur oleh undang-undang, dan dalam hukum diperlukan suatu penegasan status seseorang wanita atau laki-laki, karena penentuan status demikian itu diperlukan baik dalam hukum perdata maupun hukum pidana.

Namun demikian menurut penulis, seyogyanya hakim dalam memberikan putusan penetapannya harus melihat dan mempertimbangkan sisi agama yang dianut pemohon. Salah satu hubungan hukum yang bisa terjadi setelah adanya penetapan pengadilan yang erat kaitannya dengan masalah agama yaitu perkawinan. Sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang perkawinan yang berjalan di Indonesia, bahwa sah tidaknya suatu perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum agama yang dianut oleh masing-masing pihak. Oleh karenanya, apabila perubahan status tersebut telah ditetapkan, sementara pemohon terhalang melakukan perkawinan karena agama yang dianutnya tidak membenarkan adanya perkawinan antara seorang laki-laki dengan dengan seorang mantan laki-laki atau sebaliknya, maka dengan demikian berarti akan menimbulkan masalah yang lebih besar bagi pemohon.

4.2.2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Bagi Transseksual Pasca Operasi

Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk mempertahankan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya secara positif dalam

mewujudkan tujuan perkawinan. Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan, dan hidup berdampingan dengan perintah Allah dan petunjuk Rasulullah. Al-Qur'an surat Ar-Rum (30) ayat 21, Allah berfirman :

*“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri agar dapat hidup damai bersamanya, dan dijadikan rasa kasih sayang di antaramu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir “.*⁷²

Berdasarkan uraian diatas, dapat penulis kemukakan bahwa perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* (nature law) yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan salah satunya manusia, dan sebagai jalan untuk memenuhi tuntutan biologis yang sah dan diridhai Allah, dimana tujuannya menurut hukum Islam antara lain untuk mendapat keturunan dan menenangkan ketentraman.

Jika perkawinan tersebut dikaitkan dengan tindakan operasi bagi transseksual, mengingat transseksual sendiri juga ada indikasi untuk menikah, maka pada beberapa aspek tidak sejalan dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Hal ini dapat dipahami dari beberapa hal : a. penderita (transseksual) akan mengalami kemandulan tetap; b. tidak akan lagi memberikan keturunan, dan tidak dapat pula memenuhi kebutuhan biologis atau seksualnya secara normal; c. dapat menimbulkan konflik

⁷². *Quran*, 30:21

dalam rumah tangga sebab suami / isteri setelah operasi ubah kelamin tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri yang normal.

Menurut pernyataan Prof Dr. Ahmad Rofiq, MA⁷³, operasi ubah jenis kelamin itu sifatnya aksesoris belaka dan tidak berfungsi normal.⁷⁴ Dalam kacamata syariat pun tidak membuatnya berganti jenis kelamin sehingga statusnya tetap laki-laki meski suara, bentuk tubuh, kulit dan seterusnya mirip wanita atau sebaliknya. Bagi transseksual yang melakukan operasi ubah kelamin, dalam hal menentukan status jenis kelamin pasca operasi adalah, ia tetap berstatus dengan jenis kelaminnya yang asli yang ada sejak ia dilahirkan, sebagaimana dinyatakan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang operasi perubahan / penyempurnaan kelamin tanggal 1 Juni 1980 (12 Rajab 1400 H)⁷⁴ dan juga dijelaskan dalam hadist berikut ini :

“ Berilah warisan dari mana awalnya ia buang air kecil “

Selain itu, menurut hukum Islam perkawinan yang dilakukan oleh transseksual adalah haram hukumnya. Pada dasarnya perkawinan transseksual adalah perkawinan yang dilakukan sesama jenis kelamin dan Islam mengharamkan jenis perkawinan tersebut. Allah tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya (nafsu) secara anarki yang tidak ada aturannya.

⁷³. Prof. Ahmad Rofiq, MA, *Wawancara Pribadi*, Masjid Agung, Jln. Gajah Raya, Semarang, 16 Juni 2005

⁷⁴. Himpunan Fatwa MUI, *Operasi Perubahan / Penyempurnaan Kelamin*, Jakarta, 1980

Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai martabatnya, seperti yang terdapat dalam surat Yasin 36 :

“ Maha suci Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui “

Bagi sebagian orang yang berpendapat bahwa penderita transseksual sama halnya dengan penderita homoseksual. Menurut Rohmadi, M.Ag (dosen mata kuliah Fiqh Munakahat Fakultas Syariah IAIN Wali Songo Semarang),⁷⁵ perkawinan homoseksual adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh sesama jenis kelamin, adakalanya dilakukan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Oleh karena itu kesepakatan ulama bahwa jenis perkawinan tersebut tidak diperbolehkan (haram hukumnya), karena sesungguhnya homoseksual itu merupakan perbuatan keji dan dosa besar.

Demikian pula pernyataan yang senada juga dikemukakan oleh Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA⁷⁶ bahwa perkawinan yang dilakukan oleh transseksual itu tidak diperbolehkan selain karena perkawinan itu pada dasarnya perkawinan sesama jenis kelamin juga melihat lagi ke awal hukumnya bahwa penderita (transseksual) yang melakukan operasi

⁷⁵. Romadi, M.Ag, *Status Perkawinan Homoseksual perspektif Fiqh* (Majalah Justisia), IAIN Walisongo, Edisi 25 Th XI 2004, hal 58

⁷⁶. Prof.Dr. Ahmad Rofiq, *Wawancara Pribadi*, Masjid Agung, Jln Gajah Raya, Semarang 16 Juni 2005

kelamin adalah haram hukumnya. Selain itu upaya-upaya syaitan kepada manusia untuk merubah segala ciptaan Allah; perilaku, sikap maupun fisik, yang menjadi larangan Allah.

Dari pernyataan diatas, dapat penulis kemukakan bahwa perkawinan merupakan jalan untuk memenuhi tuntutan biologis yang sah dan diridlai Allah. Maksud dari perkawinan yang sah dan diridlai Allah adalah suatu perkawinan yang dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dan yang telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Di antara rukun-rukun yang sangat krusial dalam perkawinan tersebut dilakukan oleh kedua calon mempelai yang berbeda jenis kelamin yaitu wanita dan pria, terang laki-lakinya (bukan banci) dan terang perempuannya (bukan banci). Di samping itu juga adanya wali nikah, dua orang saksi dan ijab Kabul. Apabila sebuah perkawinan tidak terpenuhi syarat dan rukunnya maka perkawinan tersebut tidak sah.

Namun apabila perkawinan tersebut telah berlangsung, berdasarkan pernyataan Drs. H. Muhyiddin (sekretaris komisi fatwa MUI)⁷⁷, bahwa menurut teori fikih perkawinan tersebut tidak sah atau dianggap tidak adanya suatu perkawinan, perkawinan tersebut disamakan dengan perkawinan terhadap sesama jenis kelamin. Al-Qur'an melarang

⁷⁷.Drs. H Muhyiddin, *Wawancara Pribadi*, Kantor MUI, Komplek Masjid Raya Baiturrahman, Semarang, 7 Juni 2005

untuk menyukai sesama jenis kelamin sebagaimana diuraikan sebagai berikut :⁷⁸

Dan (Kami) juga telah mengutus Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala ia berkata kepada kaumnya : "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu) yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelummu ?

Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Kamu ini adalah kaum yang melampaui batas (Q.S Al-A'raf: 80-81)

Oleh karena itu perkawinan tersebut dapat dimintakan pembatalan kepada hakim pengadilan agama, karena salah satu rukun di dalam perkawinan tidak terpenuhi. Sehingga pembatalan suatu perkawinan itu dianggap seolah-olah tidak pernah terjadi sama sekali suatu perkawinan.

Dari pernyataan diatas dapat penulis simpulkan bahwa perkawinan transeksual itu tidak diperbolehkan. Sama halnya dengan perkawinan homoseksual, perkawinan transseksual pada dasarnya dilakukan oleh sesama jenis kelamin dan Islam menolak tegas dan mencela hubungan sesama jenis kelamin karena akan memutuskan jalan untuk memperoleh keturunan. Hal ini jelas bertentangan dengan tujuan perkawinan yang diantaranya untuk mempunyai keturunan. Oleh karena itu perkawinan tersebut dapat dimintakan pembatalan kepada hakim Pengadilan agama, dimana salah satu yang menjadi rukun perkawinan tidak terpenuhi.

⁷⁸.Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hal 234

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dalam tesis yang mengangkat judul “ *Perubahan Kelamin Bagi Transseksual Dalam Kaitannya Dengan Perkawinan Menurut Hukum Islam* “, maka dalam bab penutup ini akan diberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari penelitian didapatkan adanya beberapa istilah atau bentuk operasi kelamin yang telah dilakukan dalam dunia kedokteran modern. Secara garis besar ada tiga macam yaitu :

a. Operasi perbaikan kelamin atau penyempurnaan kelamin.

Operasi tersebut dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelamin atau gangguan organ kelamin (kelainan congenital). Contohnya yang sering ditemukan adalah pada kasus hispodia, yakni penderita yang zakar (penis)nya atau faraj (vagina)nya tidak sempurna saluran organ kelamin luarnya (saluran uretha)nya.

Dalam pandangan hukum Islam, operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin boleh dilakukan (mubah) dan tidak ada masalah karena operasi tersebut bersifat memperbaiki atau menyembuhkan organ kelamin yang cacat atau yang kerena ada kelainan anatomis. Secara

argumen operasi kelamin tersebut membawa masalah atau manfaat yang lebih besar untuk kesehatan fisik dan mental sekaligus merupakan pengobatan bagi penyakit yang memang sejak lahir tidak normal jenis kelaminnya dan hal ini diperbolehkan oleh hukum Islam.

b. Operasi penyesuaian kelamin atau operasi memperjelas salah satu jenis organ kelamin.

Operasi kelamin yang dilakukan dengan cara pembuangan salah satu dari kelamin ganda, yang dilakukan terhadap anak atau penderita yang mempunyai organ genitalia eksterma (alat kelamin luar) yang tidak jelas apakah laki-laki atau perempuan atau terhadap penderita yang mempunyai bentuk jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan (terdapat 2 organ kelamin luar sekaligus yaitu penis dan vagina). Operasi ini adalah untuk memperjelas salah satu jenis kelamin luar yang disesuaikan dengan jenis kelamin biologi lainnya dan jenis kelamin psikisnya.

Dalam pandangan hukum Islam, operasi kelamin itu harus melihat adanya kecenderungan lebih kearah kemaslahatan (manfaat) atau lebih ke madlarat (bahaya/kerusakan). Bila operasi kelamin tersenut mkembawa manfaat yang lebih besar maka hukumnya bias mubah (boleh). Tetapi apabila operasi yang untuk menghidupkan alat kelamin luar dan berlawanan dengan alat kelamin dalam maka hukumnya bias

tidak boleh (haram) karena hal tersebut cenderung membawa bencana dan tidak ada hajat (kebutuhan) terhadap hal tersebut.

c. Operasi penggantian jenis kelamin.

Operasi kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelamin biologis normal apakah sebagai laki-laki atau perempuan. Tetapi dalam pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya mengalami permasalahan psikis dan perilaku yang kemudian timbul permasalahan identitas kelamin psikisnya yang berlawanan dengan organ kelamin biologinya. Kondisi ini yang kemudian dikenal dengan istilah gangguan "*Transseksual*".

Di dalam pandangan hukum Islam tentang kasus transseksual yang melakukan operasi ubah jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya hukumnya haram karena bertentangan dengan Al Qur'an surat An-Nisa ayat 19 dan bertentangan pula dengan jiwa Syara.

Operasi kelamin transseksual cenderung mengarah kepada keinginan duniawi dan cenderung keinginan pribadi yang disertai dengan nafsu semata tanpa melihat mafsadat atau kerusakannya akan lebih besar daripada maslahat atau manfaatnya.

Bagi transseksual yang melakukan operasi kelamin, dalam hal menentukan status jenis kelamin pasca operasi adalah ia tetap berstatus dengan jenis kelamin yang asli yang ada sejak ia lahir.

2. Berkenaan dengan status jenis kelamin di dalam kedudukan hukumnya, maka bagi transseksual pasca operasi harus diajukan permohonan perubahan jenis kelamin melalui penetapan pengadilan dengan menyertakan surat keterangan dari tim dokter yang berwenang. Perubahan kelamin bagi transseksual terhadap perkawinan menurut hukum Islam adalah bahwa perkawinan tersebut hukumnya tidak sah. Hal ini karena salah satu dari rukun perkawinan Islam tidak terpenuhi, dimana perkawinan itu dilakukan oleh kedua mempelai yang berbeda jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Selain itu, karena perkawinan ini dilakukan terhadap sesama jenis kelamin dan di dalam hukum Islam, orang yang jenis kelaminnya diganti kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum dirubah.

Dilihat dari tujuan perkawinan yang antara lain mendapatkan keturunan dan menenangkan ketentraman jiwa, operasi kelamin bagi transseksual sangat kontradiktif karena ia (transseksual) akan mengalami kemandulan tetap dan tidak akan lagi memberikan keturunan, dan tidak dapat pula memenuhi kebutuhan biologis atau seksualnya secara normal ; dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga sebab suami atau isteri setelah operasi ubah kelamin tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau isteri yang normal. Dalam kacamata syariat pun tidak membuatnya berganti jenis kelamin sehingga statusnya tetap laki-laki meski suara, bentuk tubuh, kulit dan seterusnya mirip wanita atau sebaliknya karena operasi ubah jenis

kelamin itu sifatnya aksesoris belaka dan tidak berfungsi normal. Oleh karena itu perkawinan tersebut dapat dimintakan pembatalan kepada hakim pengadilan agama, karena salah satu rukun di dalam perkawinan tidak terpenuhi. Sehingga pembatalan suatu perkawinan itu dianggap seolah-olah tidak pernah terjadi sama sekali suatu perkawinan.

5.2. Saran-saran

Saran-saran yang dapat diberikan penulis dalam bab penutup ini yang berkaitan dengan perubahan kelamin bagi transseksual dalam kaitannya dengan perkawinan menurut hukum Islam adalah sebagai berikut :

1. Transseksual itu mulanya ada karena orang itu baik laki-laki maupun perempuan di dalam pertumbuhan dan perkembangannya mengalami permasalahan psikis dan perilaku yang kontradiktif. Padahal sejak lahir orang tersebut memiliki kelamin biologis normal sebagai laki-laki dan / atau perempuan. Perilaku yang kontradiktif itu akan menimbulkan permasalahan identitas kelamin psikisnya yang berlawanan dengan organ kelamin biologisnya. Oleh karena permasalahan psikis tersebut merupakan bagian dari penyakit kejiwaan maka dalam hal ini harus ada upaya terapi jiwa dan terapi agama untuk memulihkan jiwanya sampai perilakunya normal sebagaimana layaknya orang lain. Terapi ini sebagai tindakan preventif untuk tidak dilakukannya operasi ubah jenis kelamin yang hanya merupakan nafsu duniawi, yang bertentangan dengan syariat hukum Islam.

2. Salah satu penyebab terjadinya transseksual adalah pengaruh luar (*acquired*) seperti pendidikan orang tua yang menjurus pada benih-benih terjadinya penyimpangan sosial, pergaulan yang keliru dan menyimpang. Oleh karena itu salah satu upaya untuk mencegahnya ialah dengan memberikan dan memperhatikan pendidikan, terutama pendidikan dasar yang benar dan baik pada usia dini, serta menjauhkan dari lingkungan yang tidak mendukung pengembangan pribadi secara utuh.
3. Karena masalah transseksualisme ini masih relatif baru, dan akan terus berkembang, maka perlu diikuti perkembangan dengan kajian-kajian ilmiah, yang melibatkan berbagai disiplin ilmu. Dengan demikian akan bisa diharapkan akan menghasilkan kebijaksanaan-kebijaksanaan baru yang lebih tepat, terutama untuk mempersiapkan pengaturan khusus mengenai masalah ini.
4. Sebagaimana telah disimpulkan bahwa perkawinan terhadap perubahan kelamin bagi transseksual dilihat dari hukum Islamnya adalah perkawinan tersebut hukumnya haram. Menurut hukum Islam perkawinan itu dilakukan terhadap sesama jenis kelamin walaupun secara fisik berbeda namun di dalam Islam kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum di rubah. Selain itu apa yang menjadi rukun didalam perkawinan Islam tidak terpenuhi, bahwa perkawinan itu dilakukan oleh kedua calon mempelai yang berbeda jenis kelamin. Oleh karena itu bagi para pihak ada baiknya sebelum melangsungkan perkawinan

mengetahui asal-usul para pihak tidak hanya dilihat dari agama, keluarganya, hartanya tetapi juga kejelasan status jenis kelaminnya. Hal ini juga dituangkan sebagai salah satu syarat perkawinan di dalam Islam dari syarat-syarat lainnya yaitu bahwa bagi calon mempelai laki-laki harus terang laki-lakinya begitu juga sebaliknya. Kejelasan status jenis kelamin ini sangat penting untuk menghindari agar tidak terjadi konflik di dalam rumah tangga karena tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri yang normal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Achid, Masduki, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Perpustakaan Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 1988
- Al-Suyuthi, *Al-Jami Al-Shaghir*, vol II, Mustafa al-Babi al-hababi wa-Auladuh, 1954
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam)*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1998
- _____, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, 1999
- Al-Qur'an dan terjemahannya*, Semarang, Asy-Syira, 1998
- Amrullah, Ahmad, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta Gema Insani Press, Jakarta, 1996
- Asin, *Status Perkawinan Antar Agama Di Tinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No 1 / 1974*, PT Dian Rakyat, Jakarta, 1986
- Asri, Bennyamin, *Tanya Jawab Hukum Perkawinan Islam*, Penerbit Tarsito, Bandung, 1988
- Asadori et al, *Tinjauan Yuridis Perubahan Jenis Kelamin Pria menjadi Wanita*, Universitas DiPoegoro, Semarang, 2004
- Atmojo, Kemala, *Kami Bukan Lelaki*, Cet II, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1986
- Azhari, M. Tahir, *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam*, Bandung Angkasa, Bandung, 2001
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, UII Press Yogyakarta, 2000
- Brotosusilo, Agus, *Penulisan Hukum*, Dikti Konsorsium Ilmu Hukum, Jakarta, 1992
- Bukhori M, *Hubungan Seks Menurut Islam*, PT. Bumi Aksara, 2001
- Burhan, Ashofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rosdakarya, Bandung, 2000

Dahlan, Sofwam, *Hukum Kesehatan (Rambu-rambu Bagi profesi Kedokteran)*, ed II, Badan Penerbit UNDIP, 2000

Departemen Agama RI. Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Jakarta : *Proyek Pebinaan Sarana Keagamaan Islam Dirjen bimas Islam dan Urusan Haji*, Departemen Agama, 1984

Ensiklopedi Hukum Islam, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1993

Fyzee, Asaf, *Pokok-Pokok Hukum Islam II*, Tinta Mas, Jakarta, 1965

Hadi, Strisno, *Metodologi Research*, Jilid II, Andi Offset, Yogyakarta, 1989

Hawari, Dadang *Al'Quran IKJ Dan Kesehatan Jiwa*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1997

Himpunan Fatwa MUI Tentang *Operasi Perubahan / Penyempurnaan Kelamin*, Jakarta, 1980

Ilyas, Hamim, *Orientasi Seksual Dalam Kajian Islam*, Makalah Dalam Seminar Nasional tentang Seksualitas Dan kekerasan terhadap Perempuan Tanggal 27-29 Juli 2000

Kartono, Kartini, *Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Sexual*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1990

Koeswinarno, *Waria Dan Komunikasi*, The Toyota Foudation, Jakarta, 1993

_____, *Komunikasi Sosial Kaum Minoritas*, The Toyota Foundation, Jakarta, 1993

Marzuki, *Metodologi Riset*, BPFE-UII, Yogyakarta, 1989

Money J, *Component Of Erotism in Man: Cognital Rehearsals*, Grune and Stratton, New York, 1960

Mouhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rakesaren, Yogyakarta, 1990

Muhibin. MA, *Wawancara Pribadi*, IAIN Wali Songo Semarang, 16 Juni 2005

Muchoyyar M, *Wawancara Pribadi*, Kantor MUI Jawa Tengah, Semarang, 13 Juni 2005

- Muthahhar, Murtadha, *Etika Seksual Dalam Islam*, PT. Lentera Basritama, Jakarta, 1999
- Muhyiddin, *Wawancara Pribadi*, Kantor MUI, Komplek Masjid Raya Baiturrahman, Semarang, 7 Juni 2005
- Nadia, Zunly, *Waria Laknat atau Kodrat*, Pustaka Marwa, Yogyakarta, 2005
- Nasution, Johan, Bahder, *Hukum Perdata Islam (Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shadaqah)*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1997
- Nasution, S, *Metode Penelitian Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1992
- Prakoso, Djoko, I Ketut Murtika, *Azas-asaz Hukum Perkawinan Di Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Prodjohamidjojo, Martiman *Tanya Jawab Mengenai UU Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Disertai Yurisprudensi*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1991
- Rahman I Doi A, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (syariat)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2004
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Sinar Baru, Bandung, 1992
- Rasjidi, Lili, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991
- Mahdi, Mahmud, Al-Istanbuli, *Kado Perkawinan*, Pustaka Azzam, 2004
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998
- Rofiq, Ahmad, *Wawancara Pribadi*, Masjid Agung, Jln. Gajah Raya, Semarang, 16 Juni 2005
- Saleh, Wamtijk K, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, 1980

- Sanafiah, Faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi*, Yayasan Asah Asih Asuh, Malang, 1990
- Sayid, Sabiq, *Fiqh Sunnah*, PT. Alma'arif, Bandung, 1998
- _____, *Fiqush Sunnah*, Bairut, Darul Kitabil Arabi, 1971
- Sjamsuhidayat R, dan Wim de Jong, *Buku Ajar Ilmu Bedah*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1997
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986
- Soekanti, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Soemitro, Ronny, Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar baru, Bandung, 1982
- _____, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999
- Soetandyo, Wignjo, Soebroto, *Hukum Dan Metode Kajian-Kajiannya*, Jakarta, 1980
- Steadman, *Medical Dictionary*, 25th edition, The First Century, Baltimore USA, 1890-1891
- Suggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996
- Sostroadmodjo, Arso R, *Hukum Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1978
- Sutopo, HB., *Penelitian Kualitatif Bagian II*, Universitas Negeri Semarang Press, Surakarta, 1998
- Umar, Nasarudin M.A et al., *Bias Jender Dalam Pemahaman Islam*, Gama Media, Yogyakarta, 2002
- Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Kontemporer*, Bab "Transgender dan Hukum Operasi Kelamin", Saksi No.20, Bandung 2002
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Pratek*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 1990

Yash, *Transseksualisme (Sebuah Studi Kasus perkembangan Transseksual Perempuan Ke Laki-laki)*, Penerbit AINI, Semarang, 2003

YD, Nur Khoirin, *Operasi Kelamin Dalam Perspektif Hukum Islam*, Al-Hakam, IAIN Walisongo, volume XV/Edisi I/April 2004

B. Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam Indonesia, 1991 / 1992, Jakarta : Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam departemen Agama

C. Koran/Majalah

Harian Umum Suara Merdeka, 29 Januari 2004

Masyaroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasi Pada Transseksual*, Tesis S2 Magister Hukum. Universitas Sulatan Agung, Semarang, 2005

Romadi, *Status Perkawinan Homoseksual perspektif Fiqh* (Majalah Justisia), IAIN Walisongo, Edisi 25 Th XI 2004